



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

PETIKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 111.1/SK/REKTOR-UPY/IX/2025

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan: dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Menugaskan kepada para Dosen Pengampu Mata Kuliah dimaksud untuk melaksanakan pembelajaran matakuliah sebagaimana tercantum pada lajur 3 lampiran keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 08 September 2025
Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 19650916 199503 1 0031

Untuk Petikan yang sah
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan

Amirul Riyadi, S.Si, M.Kom
NIS. 19690214 199812 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Sarjana
4. Para Ketua Program Magister

Lampiran Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Nomor :111.1 /SK/REKTOR-UPY/IX/2025
Tanggal : 08 September 2025

NO.	NAMA PENGAJAR & NIDN	MATA KULIAH	KODE MK	SKS	SEMESTER/ KELAS	PROGRAM
1. s.d 267						
268	Gema Kharismajati.,S,Kom.,M.Kom 0514019601	Desain Web dan Pengenalan Framework Algoritma & Pemrograman Praktikum Algoritma & Pemrograman Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	TKM11125 SI17105 SI17106 SI17121 SI17123	4 2 2 3 2	III / A1 I / 17-25.A1 I / 17-25.A1 III / 17-24.A1 III / 17-24.A1	Program Sarjana Informatika Program Sarjana Sistem Informasi Program Sarjana Sistem Informasi Program Sarjana Sistem Informasi Program Sarjana Sistem Informasi
269 Dst.						



Untuk Petikan yang sah:
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ahmad Riyadi, S.Si., M.Kom
NIS. 19690214 199812 1 006

Rektor

ttd

Prof. Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 19650916 199503 1 003



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN BERITA ACARA PERKULIAHAN DAN PENILAIAN

Dokumen ini disusun sebagai bukti keterlaksanaan proses pembelajaran di Universitas PGRI Yogyakarta.

Nama : Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.
NIS : 199601142024011006
Jabatan : Ketua Program Studi Sistem Informasi
Fakultas : Fakultas Sains Teknologi

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen Berita Acara Perkuliahan dan Berita Acara Pengisian Nilai untuk:

Dosen : Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.
Mata Kuliah : SI17123 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kelas : 17-24.A1
Tahun Akademik : Ganjil 2025/2026

yang dilampirkan merupakan dokumen resmi akademik yang disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya, terencana, dan terdokumentasi.

Dengan demikian, dokumen ini dinyatakan sah, autentik, valid, dan akuntabel, serta dapat digunakan sebagai bukti dukung audit mutu internal, akreditasi, evaluasi pembelajaran, dan pelaporan akademik.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2026

Ketua Program Studi,



Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.

NIS: 199601142024011006



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Dari :

Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.

Dosen Matakuliah :

SI17123 / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelas :

17-24.A1

Menyatakan bahwa proses input BERITA ACARA PELAKSANAAN PERKULIAHAN untuk matakuliah tersebut telah berhasil dilakukan. Penginputan BAP tersebut dilakukan dengan cermat. Adapun bila terjadi kesalahan data, saya bersedia bertanggung jawab penuh.

Berkas daftar nilai mahasiswa saya lampirkan bersama dengan berita acara ini.

Terima kasih.

Hormat saya,



Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.

Ringkasan Nilai

Nilai Rata-Rata Kelas : 90.04

Nilai Tertinggi Kelas : 96.6375

Nilai Terendah Kelas : 71.8375



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

PRESENSI DOSEN MENGAJAR

TA. 20251 Ganjil

Dosen : Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.
Mata Kuliah : SI17123 / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SKS : Teori = 2 SKS ;
Periode : 20251 Ganjil

Program Studi : [S1] - Sistem Informasi
Kurikulum : KUR-SI2024 - Kurikulum Prodi Sistem Infomasi 2024
Nama Kelas : 17-24.A1
Peserta : 9

Pertemuan	Waktu & Tempat	Materi	Indikator Capai	Peserta	Status
1	Selasa, 09 Sep 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Konsep Dasar SPBE dan e-Government Kebijakan dan Regulasi SPBE Tata Kelola SPBE Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.	10	Terlaksana
2	Selasa, 16 Sep 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Kebijakan Nasional dan Regulasi SPBE (Perpres 95/2018, PermenPAN-RB, BSSN untuk keamanan).	Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.	9	Terlaksana

Pertemuan	Waktu & Tempat	Materi	Indikator Capai	Peserta	Status
3	Selasa, 23 Sep 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.	7	Terlaksana
4	Selasa, 30 Sep 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Nasional SPBE.	Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.	7	Terlaksana
5	Selasa, 07 Oct 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Implementasi Sistem e-Government di Indonesia (e-KTP, e-Procurement, e-Samsat, dll.).	Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.	9	Terlaksana
6	Selasa, 14 Oct 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Elektronik (indikator efektivitas, efisiensi, kepuasan publik).	Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.	9	Terlaksana
7	Selasa, 21 Oct 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	E-Participation: Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Digital.	Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.	9	Terlaksana

Pertemuan	Waktu & Tempat	Materi	Indikator Capai	Peserta	Status
8	Selasa, 28 Oct 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Ujian Esai/Tertulis	Ujian Esai/Tertulis	9	Terlaksana
9	Selasa, 04 Nov 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Konsep Enterprise Architecture (TOGAF dan SPBE EA).	Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.	9	Terlaksana
10	Selasa, 11 Nov 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Infrastruktur Teknologi untuk SPBE (cloud government, data center nasional, aplikasi umum).	Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.	9	Terlaksana
11	Selasa, 18 Nov 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Studi Kasus Penerapan SPBE di Kementerian dan Pemerintah Daerah.	Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.	9	Terlaksana
12	Selasa, 25 Nov 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Manajemen Data dan Interoperabilitas SPBE (hubungan dengan Satu Data Indonesia).	Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	9	Terlaksana

Pertemuan	Waktu & Tempat	Materi	Indikator Capai	Peserta	Status
13	Selasa, 02 Dec 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Keamanan Informasi dalam SPBE (standar BSSN, ISO 27001, aspek privasi).	Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	9	Terlaksana
14	Selasa, 09 Dec 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Audit dan Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan.	Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	9	Terlaksana
15	Selasa, 16 Dec 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Bimbingan tugas kelompok - Penilaian Sistem Informasi Pemerintahan dengan Framework SPBE.	Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	9	Terlaksana
16	Selasa, 23 Dec 2025 08:40 s.d 10:20 Ruang Kelas 307 A	Ujian Akhir Semester (UAS)	Ujian Akhir Semester (UAS)	9	Terlaksana

Dosen



(Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.)

Dicetak pada 22-01-2026



E-mail : info@upy.ac.id

Dosen : Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.
Mata Kuliah : SI17123 / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SKS : Teori = 2 SKS ;
Periode : 20251 Ganjil

Program Studi : [S1] - Sistem Informasi
Kurikulum : KUR-SI2024 - Kurikulum Prodi Sistem
Infomasi 2024
Nama Kelas : 17-24.A1
Peserta : 9

[illegible]

#	NPM	Nama Mahasiswa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	jml	% Hadir
9	24111700015	Naralisa Hanum Arguinda	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14	87.50%

Dosen



(Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.)

Dicetak pada 22-01-2026



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

Daftar Nilai Mahasiswa

Dosen : Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.

Mata Kuliah : SI17123 / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SKS : Teori = 2 SKS ;

Periode : 20251 Ganjil

Program Studi : [S1] - Sistem Informasi

Kurikulum : KUR-SI2024 - Kurikulum Prodi Sistem Infomasi 2024

Nama Kelas : 17-24.A1

Peserta : 9

#	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz (5 %)	Tugas Kelompok (31.25 %)	Tugas Mandiri/Individu (18.75 %)	Ujian Akhir Semester (UAS) (25 %)	Ujian Esai/Tertulis (20 %)	Nilai Akhir	Nilai Huruf	Angka Mutu
1	24111700001	Ivan Dwi Setyawan	95	97	98	90	90	93.94	A	4
2	24111700006	Daviq Nazril Islamy	98	98	95	95	95	96.09	A	4
3	24111700007	Puput Dwi Nugroho	78	90	90	88	78	86.5	A-	3.75
4	24111700008	Awalinda Dimmi	95	97	95	95	95	95.63	A	4
5	24111700009	Imam Syahhari	95	96	95	95	95	95.31	A	4

#	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz (5 %)	Tugas Kelompok (31.25 %)	Tugas Mandiri/Individu (18.75 %)	Ujian Akhir Semester (UAS) (25 %)	Ujian Esai/Tertulis (20 %)	Nilai Akhir	Nilai Huruf	Angka Mutu
6	24111700011	Roofi'qi Ayu Intani	95	97	98	96	96	96.64	A	4
7	24111700012	Rully Setiawan	95	97	97	96	95	96.25	A	4
8	24111700013	Chandra Sulistyo Priandoko	78	75	78	89	70	78.21	B+	3.25
9	24111700015	Naralisa Hanum Arguinda	78	70	75	72	70	71.84	B	3

Dosen



(Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.)

Dicetak pada 22-01-2026



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Disahkan Pada: 04-09-2025 14:20:25
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.



Identitas Matakuliah	Nama MK	Kode MK	Rumpun MK	Bobot(sks)	Semester	Periode
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SI17123	3	Teori = 2 SKS	3	Ganjil 2025/2026
Otoritas	Pengembang RPS		Koor. Rumpun MK		Ka. Prodi	
	Dr. Ferra Arik Tridalestari, S.T., M.T		Rianto, S.Kom., M.T		Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.	
Deskripsi Matakuliah	Mata kuliah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membahas konsep, kebijakan, regulasi, arsitektur, tata kelola, serta implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum dan kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, standar keamanan informasi, serta prinsip tata kelola pemerintahan digital. Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada pemahaman arsitektur SPBE, manajemen data dan interoperabilitas, pelayanan publik berbasis elektronik, serta e-participation. Mahasiswa juga akan dibekali kemampuan untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem e-Government (misalnya e-KTP, e-Procurement, dan layanan digital lainnya) dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.					

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	1. Konsep Dasar SPBE dan e-Government 2. Kebijakan dan Regulasi SPBE 3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 4. Manajemen Sistem TIK Pemerintahan 5. Implementasi Sistem e-Government 6. Evaluasi dan Audit SPBE 7. Manajemen Data dan Interoperabilitas 8. Keamanan dan Privasi dalam SPBE 9. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 10. E-Participation (Partisipasi Publik Digital) 11. Tantangan dan Isu Strategis SPBE 12. Praktik Evaluasi Sistem Pemerintahan		
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode CPL	Deskripsi CPL	
	CPL 1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan Jiwa Pancasila, berakhlak mulia, peka dan peduli terhadap permasalahan sosial dan lingkungan hidup, menghargai perbedaan dan keberagaman budaya, menjunjung tinggi hukum, mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat, melalui inovasi, kreativitas, dan potensi keterampilan lainnya.	
	CPL 4	Mampu menciptakan nilai bagi sistem informasi dalam suatu organisasi melalui penyelarasan SI/TI dan bisnis, serta pengembangan arsitektur enterprise, dan tata kelola SI/TI.	
	CPL 8	Mampu mengevaluasi dan mengaudit SI/TI dalam suatu organisasi berdasarkan standar IS tertentu.	
	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)		
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK	CPL
	CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi kebijakan nasional serta regulasi terkait SPBE, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan standar keamanan data pemerintah.	CPL 1
	CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.	CPL 8
	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.	CPL 4
	CPMK4	Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	CPL 8

Tabel Penilaian	Kode	Bentuk Assesment	CPMK	Bobot(%)
	TM1	Tugas Mandiri/Individu	CPMK1	18.75
	Q1	Quiz	CPMK2	5
	UT1	Ujian Esai/Tertulis	CPMK2	20
	TK1	Tugas Kelompok	CPMK3	31.25
	UAS	Ujian Akhir Semester (UAS)	CPMK4	25
	Total Bobot			100 %
Pustaka (Referensi)	<ul style="list-style-type: none"> • https://issuu.com/klikomdesignshowcase/docs/lilbookspbe • Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI 			
Team Teaching			MK Prasyarat	
Gema Kharismajati, S.Kom., M.Kom.			-	

Rincian Aktivitas Pembelajaran							
Minggu Ke -	CPMK	Indikator Ketercapaian	Bentuk Penilaian	Materi	Metode	Media	Jenis Perkuliahan
1, 2, 3, 4	CPMK1 Mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi kebijakan nasional serta regulasi terkait SPBE, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan standar keamanan data pemerintah.	Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.	• Tugas Mandiri/Individu	Materi: Konsep Dasar SPBE dan e-Government Kebijakan dan Regulasi SPBE Tata Kelola SPBE Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	Slide, Link dan buku Soft	Luring
		Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.		Materi: Kebijakan Nasional dan Regulasi SPBE (Perpres 95/2018, PermenPAN-RB, BSSN untuk keamanan). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	Slide, Link dan buku Soft	Luring
		Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.		Materi: Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	Slide, Link dan buku Soft	Luring
		Mahasiswa dapat menjelaskan isi dan tujuan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Mahasiswa dapat mengevaluasi relevansi regulasi SPBE dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital.		Materi: Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Nasional SPBE. Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	Slide, Link dan buku Soft	Luring

Rincian Aktivitas Pembelajaran							
Minggu Ke -	CPMK	Indikator Ketercapaian	Bentuk Penilaian	Materi	Metode	Media	Jenis Perkuliahan
5, 6, 7, 8	CPMK2 Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.	Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Quiz • Ujian Esai/Tertulis 	Materi: Implementasi Sistem e-Government di Indonesia (e-KTP, e-Procurement, e-Samsat, dll.). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	SLide ppt, Buku Softfile, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.		Materi: Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Elektronik (indikator efektivitas, efisiensi, kepuasan publik). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	SLide ppt, Buku Softfile, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pemerintahan elektronik, termasuk sistem e-Government, e-Procurement, dan e-KTP, dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.		Materi: E-Participation: Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Digital. Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	SLide ppt, Buku Softfile, dan link E-Learning	Luring
		Ujian Esai/Tertulis		Materi: Ujian Esai/Tertulis - Tidak ada pustaka	Ujian	Ujian	Ujian

Rincian Aktivitas Pembelajaran							
Minggu Ke -	CPMK	Indikator Ketercapaian	Bentuk Penilaian	Materi	Metode	Media	Jenis Perkuliahan
9, 10, 11	CPMK3 Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.	Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.	• Tugas Kelompok	Materi: Konsep Enterprise Architecture (TOGAF dan SPBE EA). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended LEarning	slide, e-book, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.		Materi: Infrastruktur Teknologi untuk SPBE (cloud government, data center nasional, aplikasi umum). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended LEarning	slide, e-book, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu merancang model arsitektur SI/TI dalam pemerintahan berbasis standar seperti TOGAF dan Enterprise Architecture SPBE, serta mengevaluasi tantangan implementasinya.		Materi: Studi Kasus Penerapan SPBE di Kementerian dan Pemerintah Daerah. Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended LEarning	slide, e-book, dan link E-Learning	Luring

Rincian Aktivitas Pembelajaran							
Minggu Ke -	CPMK	Indikator Ketercapaian	Bentuk Penilaian	Materi	Metode	Media	Jenis Perkuliahan
12, 13, 14, 15, 16	CPMK4 Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.	• Ujian Akhir Semester (UAS)	Materi: Manajemen Data dan Interoperabilitas SPBE (hubungan dengan Satu Data Indonesia). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	Slide, e-book, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.		Materi: Keamanan Informasi dalam SPBE (standar BSN, ISO 27001, aspek privasi). Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	Slide, e-book, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.		Materi: Audit dan Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan. Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	slide, e-book, dan link E-Learning	Luring
		Mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan informasi, tata kelola data, dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek privasi, etika, dan hukum.		Materi: Bimbingan tugas kelompok - Penilaian Sistem Informasi Pemerintahan dengan Framework SPBE. Pustaka: - https://issuu.com/klirkomdesignshowcase/docs/lilbookspbe - Amane, Ade Putra Ode, S. Sos, Yeyen Subandi, Tb M. Adrie Admira, and Harrizki Arie Pradana. "DIGITALISASI Governansi." penerbit AYRADA MANDIRI	Blended Learning	slide, e-book, dan link E-Learning	Luring
		Ujian Akhir Semester (UAS)		Materi: Ujian Akhir Semester (UAS) - Tidak ada pustaka	Ujian	Ujian	Ujian



E-GOVERNMENT (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)

Gema Kharismajati, S.Kom.,M.Kom

NIS. 19960114 202401 1 006

NIDN. 0501149601

WA: 082226359766

SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas PGRI Yogyakarta



TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa memahami konsep dasar SPBE dan e-Government.
2. Mahasiswa mengenal perbedaan e-Government tradisional dengan SPBE terintegrasi.
3. Mahasiswa mengetahui dasar hukum SPBE, khususnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.
4. Mahasiswa memahami tujuan, manfaat, dan tantangan implementasi SPBE di Indonesia.

POKOK MATERI

Pendahuluan: Transformasi Digital di Pemerintahan

- Era digital mendorong perubahan besar di semua sektor, termasuk pemerintahan.
- Sebelum era digital, pelayanan publik dilakukan manual → lambat, birokratis, tidak efisien.
- Digitalisasi di pemerintahan dikenal dengan istilah **e-Government** → pelayanan publik mulai berbasis elektronik.
- Kini berkembang menjadi **SPBE** → konsep integrasi sistem pemerintahan dalam satu ekosistem digital.

Contoh:

- Dulu: Mengurus KTP harus datang ke kantor kelurahan, antre, banyak berkas.
- Sekarang: Ada e-KTP, pendaftaran online, database kependudukan terintegrasi.

POKOK MATERI

Konsep Dasar SPBE

Definisi SPBE (menurut Perpres No. 95 Tahun 2018):

"SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi."

Karakteristik SPBE:

- **Integrasi:** Semua sistem pemerintahan saling terhubung (pusat dan daerah).
- **Efisiensi:** Mengurangi proses birokrasi berulang.
- **Transparansi:** Masyarakat bisa memantau layanan secara online.
- **Partisipasi Publik:** Masyarakat bisa memberi masukan/aspirasi digital (e-Participation).



PERBEDAAN SPBE & E-GOVERNMENT

Aspek	e-Government Lama	SPBE Modern
Integrasi Sistem	Sering terpisah, tiap instansi sendiri	Terintegrasi nasional (Satu Data)
Fokus Layanan	Digitalisasi dokumen/manual	Layanan publik berbasis teknologi cerdas
Tata Kelola	Belum ada standar terpadu	Mengacu arsitektur SPBE nasional
Partisipasi Publik	Terbatas	Masyarakat bisa memberi masukan online

DASAR HUKUM & KEBIJAKAN SPBE

a. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

Menjadi **payung hukum utama** SPBE di Indonesia.

Tujuannya:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
- Meningkatkan keterpaduan antar instansi pemerintah.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan inovatif.

b. Regulasi Pendukung Lainnya

- **PermenPAN-RB**: Pedoman penyelenggaraan pelayanan publik digital.
- **BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)**: Standar keamanan informasi.
- **Satu Data Indonesia**: Integrasi data lintas instansi dan pemerintah daerah.



TUJUAN DAN MANFAAT SPBE

- **Efisiensi & Efektivitas:** Proses administrasi jadi cepat dan murah.
- **Transparansi & Akuntabilitas:** Masyarakat bisa memantau proses layanan.
- **Kemudahan Akses Layanan:** Layanan 24/7 tanpa harus datang ke kantor.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Layanan pemerintah jadi lebih profesional.
- **Kolaborasi & Partisipasi Publik:** Masyarakat dapat memberi aspirasi online.



TANTANGAN IMPLEMENTASI SPBE DI INDONESIA

- Infrastruktur TIK yang belum merata.
- Sumber daya manusia (SDM) pemerintah yang belum semua siap digital.
- Keamanan dan privasi data.
- Perubahan budaya birokrasi dari manual ke digital.



TANTANGAN IMPLEMENTASI SPBE DI INDONESIA

Tugas:

Cari 1 contoh layanan SPBE di Indonesia, tulis:

- Nama layanannya
- Instansi penyelenggara
- Manfaat yang dirasakan masyarakat

Format: Satu halaman, dikumpulkan di LMS/Google Classroom.

Deadline: Sebelum pertemuan ke-2.



KEBIJAKAN DAN REGULASI SPBE (PERPRES NO. 95 TAHUN 2018 & PERMEN PANRB)

- Memahami dasar hukum pelaksanaan SPBE di Indonesia.
- Menganalisis isi dan makna Perpres 95/2018.
- Menjelaskan peran Permen PANRB dalam implementasi SPBE.
- Mengaitkan kebijakan SPBE dengan reformasi birokrasi digital.



Latar Belakang Kebijakan SPBE

- Sebelum SPBE: sistem informasi pemerintah berjalan terpisah.
- Terjadi duplikasi data dan inefisiensi anggaran.
- Diperlukan sistem terintegrasi dan satu kebijakan nasional.
- SPBE menjadi strategi digitalisasi pemerintahan Indonesia.



Dasar Hukum SPBE

- **Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018** → Payung hukum utama SPBE.
- **Permen PANRB No. 59 Tahun 2020** → Pedoman teknis pelaksanaan SPBE.
- **Keterkaitan:** Perpres = arah kebijakan, Permen = petunjuk teknis.



Tujuan SPBE dalam Perpres 95/2018

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
- Meningkatkan keterpaduan layanan antarinstansi.
- Memberikan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik.



Prinsip dan Ruang Lingkup SPBE

Prinsip SPBE:

- Efisiensi dan efektivitas
- Transparansi dan akuntabilitas
- Keamanan informasi
- Keterpaduan sistem
- Inovasi dan keberlanjutan

Ruang Lingkup SPBE:

Tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan.



Peran dan Tanggung Jawab Instansi

- **KemenPANRB:** Kebijakan & evaluasi SPBE nasional.
- **Kominfo:** Infrastruktur & integrasi jaringan.
- **BSSN:** Keamanan siber & perlindungan data.
- **Instansi pusat & daerah:** Implementasi sesuai arsitektur SPBE nasional.



Permen PANRB No. 59 Tahun 2020

- Tata kelola SPBE: struktur, koordinasi, dan peran.
- Arsitektur SPBE: data, aplikasi, proses, dan infrastruktur.
- Peta Rencana SPBE: roadmap pelaksanaan 5 tahun.



Keterkaitan SPBE dengan Reformasi Birokrasi

- SPBE mempercepat birokrasi digital.
- Mengurangi duplikasi data dan proses manual.
- Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.



Contoh Implementasi SPBE

- e-KTP → digitalisasi identitas warga negara.
- e-Samsat → integrasi pajak kendaraan.
- e-Procurement → transparansi pengadaan barang dan jasa.
- LAPOR.go.id → layanan aduan publik nasional.



Diskusi dan Refleksi

- Apa tantangan utama implementasi SPBE di daerah?
- Mengapa keterpaduan sistem menjadi isu penting?
- Bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung kebijakan SPBE?



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL

Tujuan Pembelajaran

- Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Menjelaskan konsep tata kelola pemerintahan digital (digital governance).
- Menganalisis peran teknologi dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan.
- Mengidentifikasi model tata kelola digital yang efektif sesuai prinsip SPBE.
- Mensimulasikan penerapan model tata kelola digital dalam konteks instansi pemerintahan.



Pengantar Tata Kelola Pemerintahan Digital

- Definisi tata kelola pemerintahan digital.
- Hubungan antara *governance*, *e-government*, dan *digital transformation*.
- Tujuan utama digital governance dalam SPBE.



Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Digital

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Efisiensi dan efektivitas
- Kolaborasi lintas lembaga
- Keamanan dan privasi data



Komponen Utama Tata Kelola Digital

- **Kebijakan dan Regulasi Digital**
- **Struktur Organisasi SPBE**
- **Manajemen Data dan Informasi**
- **Infrastruktur Teknologi**
- **Sumber Daya Manusia Digital**
- **Monitoring dan Evaluasi Kinerja SPBE**



Model Tata Kelola Pemerintahan Digital

- **Model Sentralisasi (Centralized Model)**
- **Model Desentralisasi (Decentralized Model)**
- **Model Hibrid (Hybrid Model)**
- Perbandingan kelebihan dan kekurangan masing-masing model.



Studi Kasus Tata Kelola Digital

- Contoh: Tata Kelola Digital di Pemerintah Kota Surabaya / Banyuwangi.
- Implementasi dashboard pelayanan publik.

<https://mpp.surabaya.go.id>

- Hasil dan dampak terhadap transparansi dan kepuasan publik.



Simulasi Model Tata Kelola Pemerintahan Digital

Aktivitas: Simulasi pembentukan struktur tata kelola digital pada instansi fiktif.


Peran:

- Kepala Instansi (Penentu kebijakan)
- Tim Teknis SPBE
- Bagian Data dan Informasi
- Auditor internal



Refleksi dan Diskusi

- Apa tantangan terbesar dalam menerapkan tata kelola digital di Indonesia?
- Bagaimana cara mengatasi resistensi birokrasi terhadap perubahan digital?
- Apa peran mahasiswa dan akademisi dalam memperkuat digital governance?



PERTEMUAN 4 (TM4): ARSITEKTUR SPBE DAN PETA RENCANA NASIONAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan struktur **arsitektur SPBE nasional**.
2. Menjelaskan komponen dan keterkaitan antar domain dalam arsitektur SPBE.
3. Menganalisis **peta rencana nasional SPBE** serta implementasinya pada instansi pemerintah.
4. Menyusun analisis sederhana terhadap arsitektur SPBE di instansi tertentu.



Pengantar Arsitektur SPBE

- Pengertian arsitektur SPBE.
- Fungsi arsitektur dalam tata kelola pemerintahan digital.
- Hubungan antara arsitektur SPBE dengan transformasi digital nasional.



Komponen Utama Arsitektur SPBE

1. Arsitektur Proses Bisnis
2. Arsitektur Data dan Informasi
3. Arsitektur Layanan
4. Arsitektur Aplikasi
5. Arsitektur Infrastruktur
6. Arsitektur Keamanan
7. Arsitektur Manajemen SPBE



Hubungan Antar Domain dalam Arsitektur SPBE

- Diagram hubungan antar domain SPBE.
- Penjelasan alur interaksi data, layanan, dan infrastruktur.
- Prinsip interoperabilitas antar instansi.



Peta Rencana Nasional SPBE

- Pengertian Peta Rencana Nasional SPBE.
- Tujuan penyusunan peta rencana.
- Dasar hukum (Perpres No. 95 Tahun 2018, dan kebijakan turunan).



Isi dan Struktur Peta Rencana Nasional SPBE

- Visi dan misi SPBE Nasional.
- Sasaran strategis dan arah kebijakan.
- Program prioritas dan tahapan implementasi.
- Indikator keberhasilan dan evaluasi.



Contoh Implementasi Arsitektur SPBE di Instansi Pemerintah

- Contoh: Kementerian Keuangan, BKN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Integrasi data dan layanan publik digital.
- Capaian transformasi digital.




Aktivitas Kelas — Analisis Arsitektur SPBE

- Tugas kelompok: Analisis arsitektur SPBE di salah satu instansi (pilihan mahasiswa).
- Langkah analisis:
 1. Identifikasi domain yang sudah berjalan.
 2. Analisis keterpaduan antar sistem.
 3. Rancang rekomendasi perbaikan atau integrasi.



Refleksi dan Penutup

- Tantangan utama dalam pembangunan arsitektur SPBE.
- Peran arsitektur dalam mendukung efisiensi birokrasi.
- Keterkaitan arsitektur SPBE dengan kebijakan nasional transformasi digital.



IMPLEMENTASI SISTEM E-GOVERNMENT — E-KTP, E-SAMSAT, DAN E- PROCUREMENT




Pengantar Implementasi e-Government

- Pengertian e-Government menurut Perpres 95/2018.
- Tujuan utama implementasi e-Government.
- Hubungan e-Government dengan SPBE dan transformasi digital.



Prinsip Implementasi e-Government

- Integrasi sistem lintas lembaga.
- Kemudahan akses layanan publik.
- Keamanan dan perlindungan data pribadi.
- Transparansi dan akuntabilitas pelayanan.



Contoh Implementasi — e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk)

- Tujuan dan fungsi e-KTP.
- Komponen sistem: database kependudukan, chip identitas, dan server pusat.
- Manfaat: validitas tunggal, mencegah data ganda, dan meningkatkan pelayanan publik.



Contoh Implementasi — e-Samsat

- Pengertian e-Samsat.
- Kolaborasi antar lembaga: Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja.
- Layanan digital: pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.
- Dampak terhadap efisiensi pelayanan publik.



Contoh Implementasi — e-Procurement

- Pengertian e-Procurement.
- Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (LPSE).
- Keuntungan: transparansi, efisiensi, dan pengawasan publik.
- Platform nasional: *inaproc.lkpp.go.id*.



Dampak Implementasi e-Government

- Peningkatan efisiensi birokrasi.
- Transparansi dan akuntabilitas meningkat.
- Pelayanan publik lebih cepat dan tepat sasaran.
- Tantangan: kesenjangan digital, keamanan data, dan resistensi budaya organisasi.



Studi Kasus dan Presentasi Mahasiswa

Tugas: pilih satu implementasi e-Government (misalnya e-KTP, e-Samsat, e-Procurement, e-BPOM, e-Lelang, dll).

Buat analisis singkat:

- Tujuan sistem
- Lembaga pengelola
- Manfaat & dampak
- Tantangan implementasi

Presentasi singkat di kelas (5–10 menit).



Refleksi dan Penutup

- e-Government sebagai wujud nyata SPBE.
- Integrasi layanan publik sebagai masa depan birokrasi digital.
- Peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola digital.



EVALUASI EFEKTIVITAS SPBE — INDIKATOR EFISIENSI DAN KEPUASAN PUBLIK



Evaluasi SPBE

- Evaluasi SPBE adalah proses penilaian terhadap sejauh mana penerapan SPBE berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi publik.
- Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerapan sistem digital dalam pemerintahan benar-benar meningkatkan kinerja, transparansi, serta pelayanan publik.



Tujuan Evaluasi SPBE

- Menilai keberhasilan penerapan SPBE di instansi pemerintah.
- Mengidentifikasi hambatan dan perbaikan yang diperlukan.
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan digital.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.



Dimensi Evaluasi SPBE

1.Kebijakan dan Tata Kelola

- Se jauh mana kebijakan dan struktur pengelolaan SPBE sudah berjalan.

2.Layanan Publik Digital

- Bagaimana kualitas layanan digital yang dirasakan masyarakat.

3.Infrastruktur dan Aplikasi

- Kesiapan infrastruktur teknologi dan interoperabilitas sistem.

4.Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kompetensi ASN dalam mengelola SPBE.



Indikator Efisiensi SPBE

- Penghematan biaya operasional.
- Pengurangan waktu pelayanan publik.
- Peningkatan produktivitas ASN.
- Integrasi dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan.



Indikator Kepuasan Publik

- Persepsi masyarakat terhadap kemudahan layanan digital.
- Tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah online.
- Responsivitas instansi terhadap keluhan digital.
- Survei kepuasan publik sebagai alat ukur utama.



Metode Evaluasi SPBE

- **Survei dan Kuesioner** – Mengukur kepuasan dan pengalaman pengguna.
- **Wawancara dan FGD** – Mendalami tantangan dan persepsi dari stakeholder.
- **Analisis Data Sistem** – Menggunakan data log, waktu respons, dan trafik.
- **Benchmarking** – Membandingkan dengan instansi lain atau standar nasional.



Studi Kasus — Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah

- Contoh: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi “Sapa Warga”.
- Indikator efisiensi: Penurunan biaya operasional hingga 20%.
- Indikator kepuasan publik: 82% pengguna merasa pelayanan lebih cepat.
- Evaluasi dilakukan dengan metode survei digital tahunan.



Kesimpulan & Diskusi

- Evaluasi SPBE penting untuk perbaikan berkelanjutan.
- Efisiensi dan kepuasan publik menjadi ukuran keberhasilan utama.
- Evaluasi harus dilakukan secara rutin dan berbasis data.
- Kolaborasi antarinstansi dan partisipasi publik memperkuat hasil evaluasi.



Tugas Praktik Lapangan — Evaluasi Efektivitas SPBE

Mahasiswa melakukan **evaluasi langsung terhadap penerapan SPBE atau e-Government** di instansi pemerintahan (bisa kantor kelurahan, dinas, atau layanan publik digital) dengan menggunakan **empat metode utama evaluasi SPBE**, yaitu:

- 1. Survei dan Kuesioner**
- 2. Wawancara dan FGD (Focus Group Discussion)**
- 3. Analisis Data Sistem**
- 4. Benchmarking**





E-PARTICIPATION DAN PARTISIPASI PUBLIK DIGITAL



Apa Itu E-Participation?

- E-Participation atau *partisipasi publik digital* adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga **mitra aktif** dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi layanan publik.



Tujuan dan Manfaat E-Participation

- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.**
- **Mendorong kolaborasi** antara pemerintah dan masyarakat.
- **Menumbuhkan kepercayaan publik.**
- **Meningkatkan kualitas kebijakan publik** melalui partisipasi langsung masyarakat.



Tingkatan E-Participation (Menurut PBB, 2020)

- **E-Information** – Pemerintah menyediakan informasi publik secara digital.
- **E-Consultation** – Pemerintah membuka ruang konsultasi dan masukan publik secara online.
- **E-Decision Making** – Masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan melalui platform digital.



Contoh Implementasi E-Participation di Indonesia

- **LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)** — sarana pelaporan masyarakat secara daring.
- **Portal Satu Data Indonesia** — akses terbuka terhadap data pemerintah.
- **Musrenbang Online** — partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- **e-Voting Pilkades/Pilkada** di beberapa daerah.



Komponen Penting dalam E-Participation

- **Aksesibilitas Teknologi** — Semua warga harus memiliki akses ke internet dan perangkat digital.
- **Keterbukaan Informasi Publik** — Pemerintah harus transparan dalam menyediakan data.
- **Keamanan dan Privasi Data** — Sistem harus melindungi identitas dan informasi pengguna.
- **Kapasitas Digital Masyarakat** — Diperlukan literasi digital agar masyarakat mampu berpartisipasi dengan efektif.



Tantangan E-Participation di Indonesia

- Kesenjangan digital antarwilayah.
- Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.
- Kurangnya respon dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
- Rendahnya kepercayaan publik terhadap tindak lanjut partisipasi digital.



Strategi Meningkatkan Partisipasi Publik Digital

- Edukasi dan literasi digital bagi masyarakat.
- Penguatan kanal komunikasi dua arah (chatbot, forum online, feedback system).
- Integrasi platform partisipasi dengan media sosial pemerintah.
- Transparansi tindak lanjut laporan publik.



Kesimpulan & Diskusi

- E-Participation adalah pilar utama pemerintahan digital.
- Meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan kualitas kebijakan publik.
- Tantangannya ada pada literasi, akses, dan respon pemerintah.
- Kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan partisipasi publik digital.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ARSITEKTUR SPBE



de balaks

01.

**PERUBAHAN
PARADIGMA TATA
KELOLA**

02.

**TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**



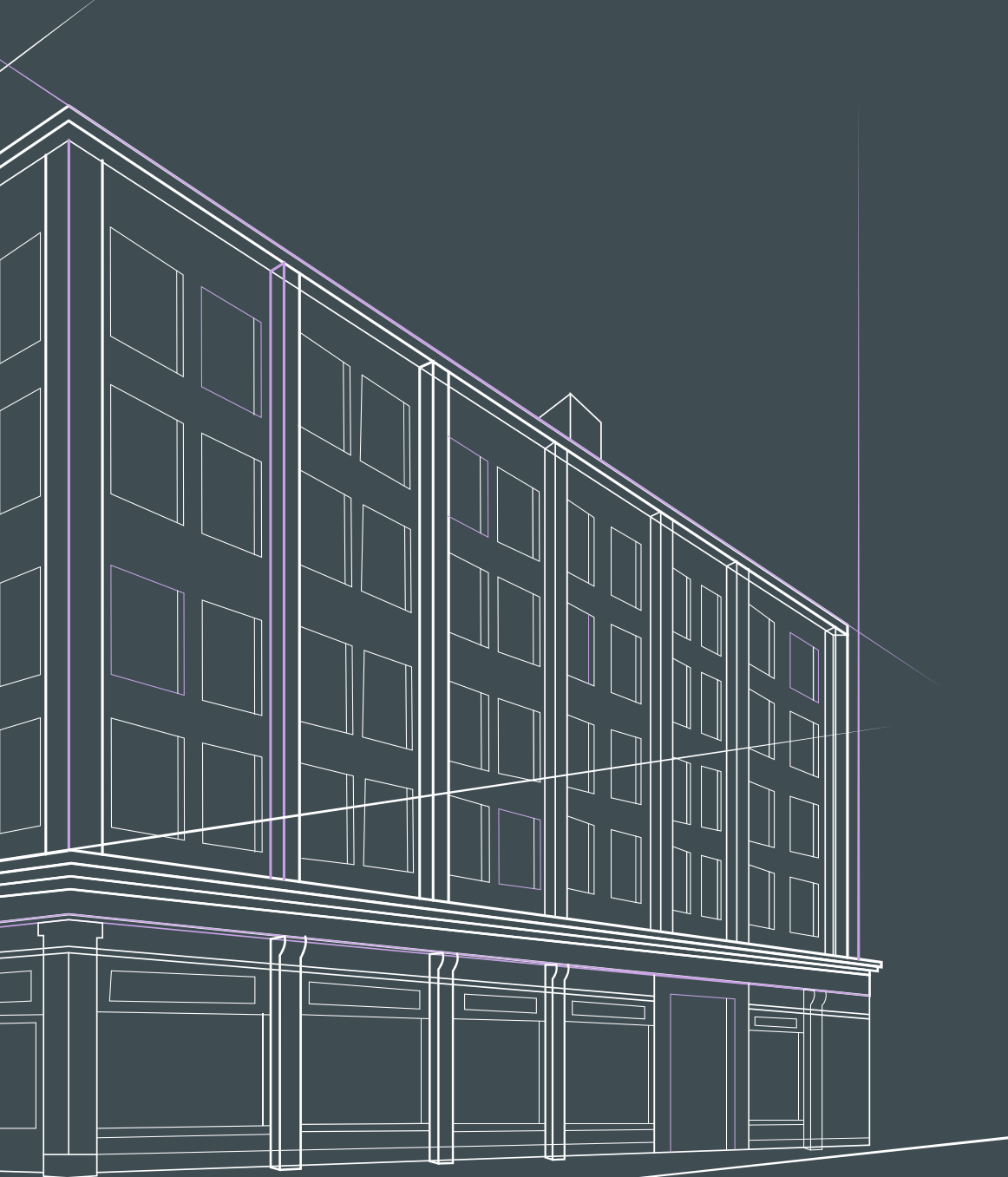
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

03.

**KERANGKA KERJA
EKOSISTEM DIGITAL**

04.

**TAHAPAN PENERAPAN
SPBE**



1

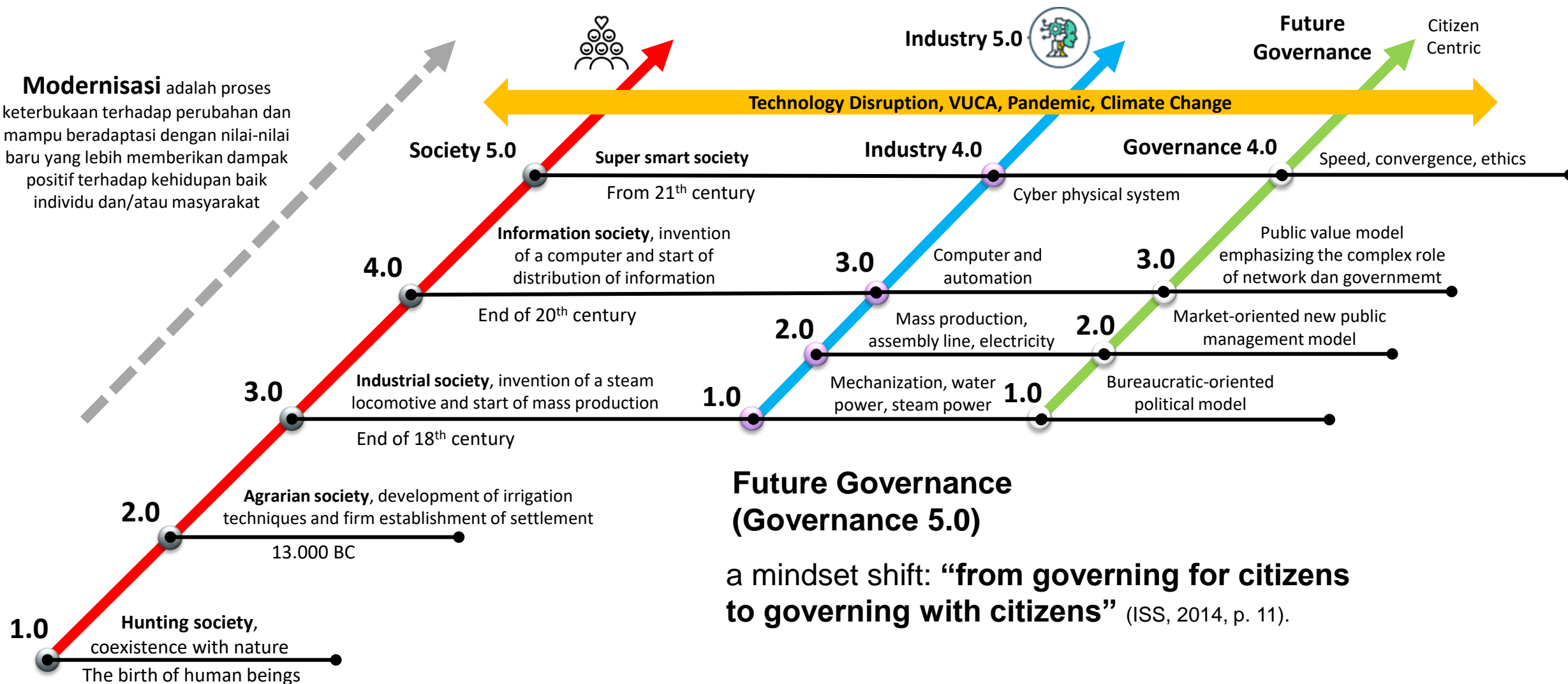
PERUBAHAN PARADIGMA TATA KELOLA



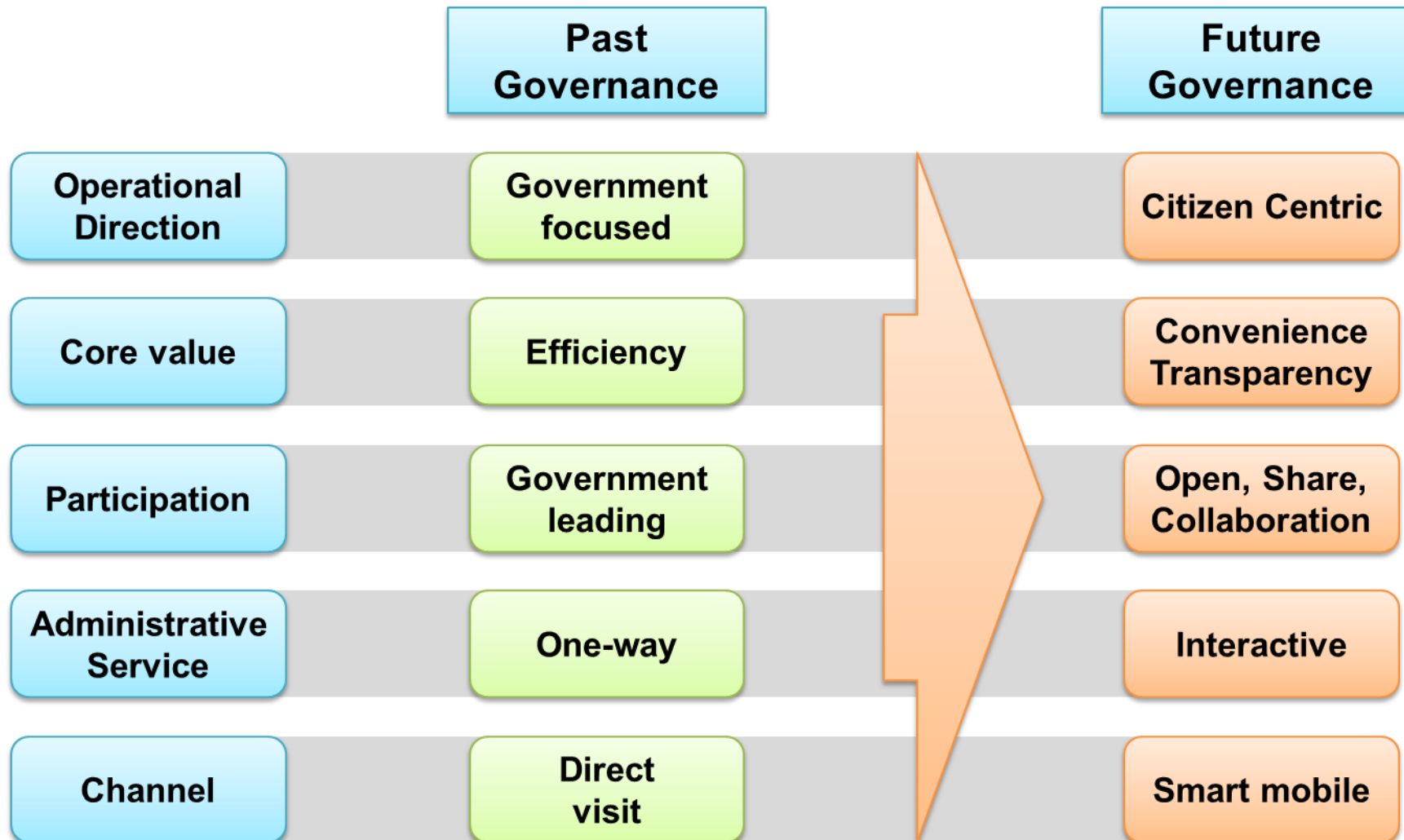
PPERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE

Multi-dimensional Transformation

Modernisasi adalah proses keterbukaan terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik individu dan/atau masyarakat



PERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE



TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN



“Tidak boleh lagi sesuatu aparatur negara tak lancar, karena memang salah organisasinya, dan tidak boleh lagi orang bekerja pada aparatur negara dengan secara lenggang-kangkong, malas-malasan, ngantuk, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan jalan korupsi waktu atau korupsi uang”

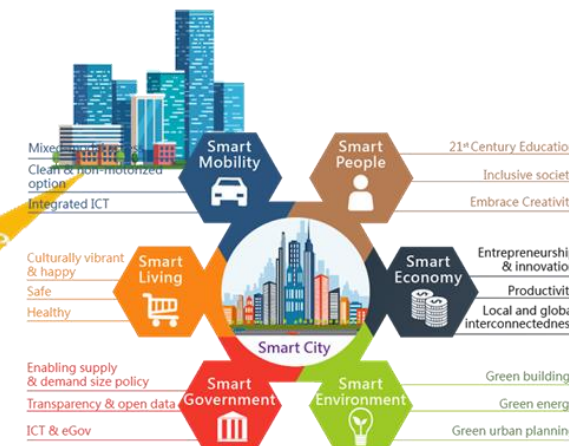
Soekarno, Presiden RI ke-1
17 Agustus 1959
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”

Tata Kelola Pemerintahan yang
efektif, responsif, dan adaptif

Governance 4.0
4th generation administrative model
with emphasis on speed,
convergence, and ethics

Transformation Leap

Pelayanan
Publik



SMART GOVERNMENT

Manajemen Kerja

Peningkatan Kualitas SDM

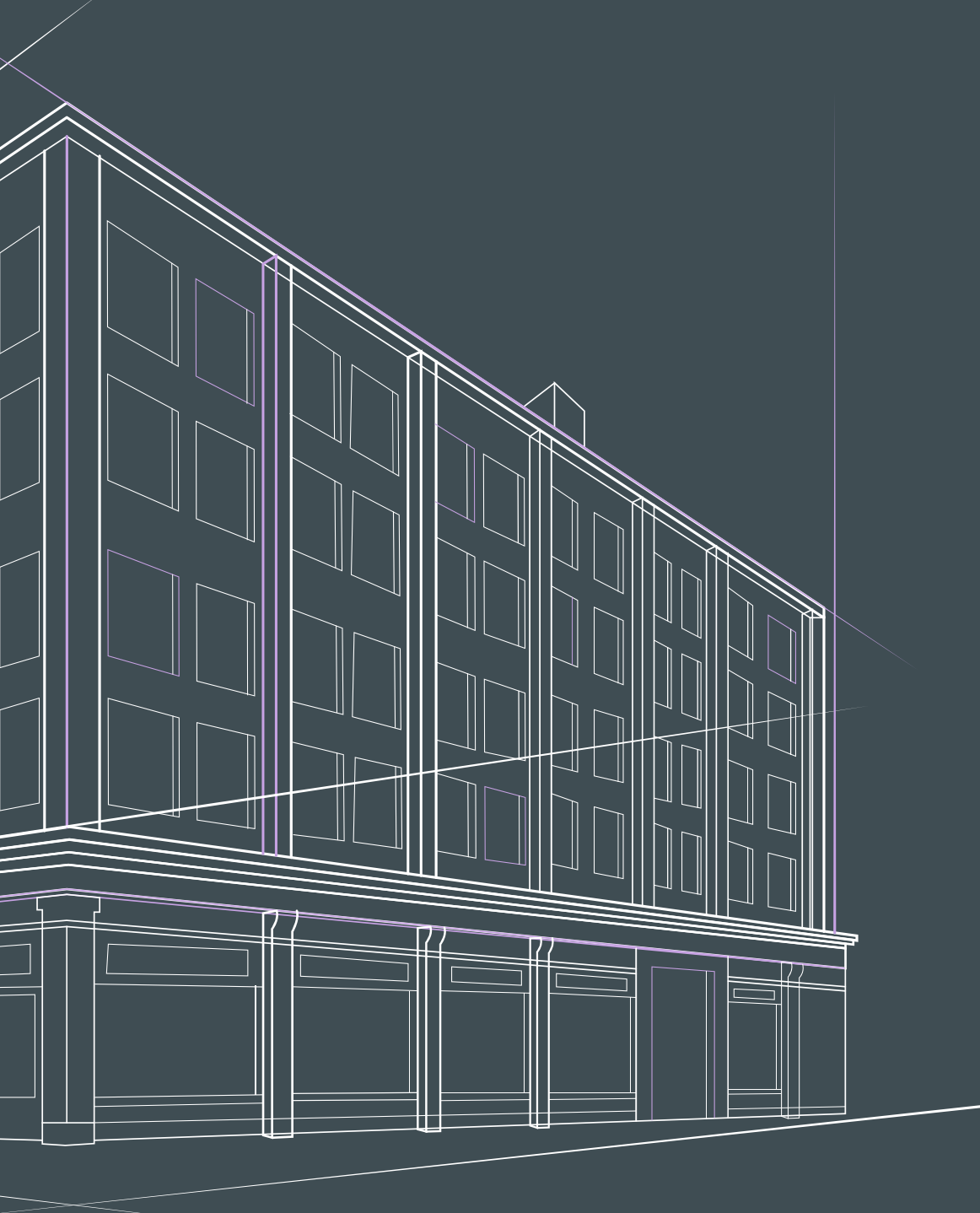
INTEGRITAS

KINERJA
PELAYANAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyederhanaan Birokrasi

Governance 1.0
Bureaucratic-oriented
political model

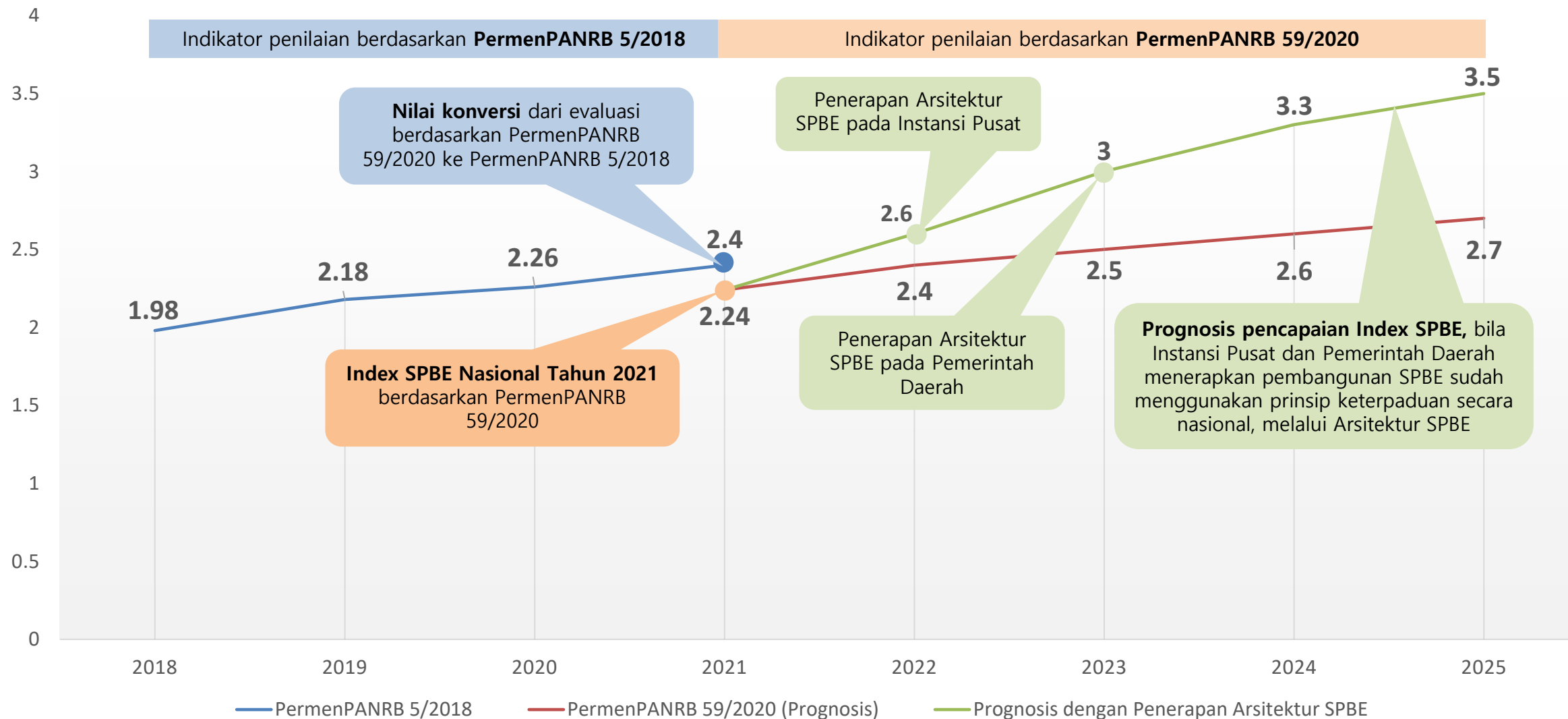


2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



PERKEMBANGAN PENERAPAN SPBE (Indeks Evaluasi SPBE)



Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

- Kementerian Bappenas (domain data dan informasi),
- Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK),
- BSSN (domain keamanan informasi)
- Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)

Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk **Instansi Pusat** hingga tahun 2023 dan untuk **Pemerintah Daerah** hingga tahun 2024

ARSITEKTUR SPBE

(Enterprise Government Architecture)

NON-STANDARD

DUPLICATION

SILO

- 27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.*
- 2700 pusat data/ruang server.*
- Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri.
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.



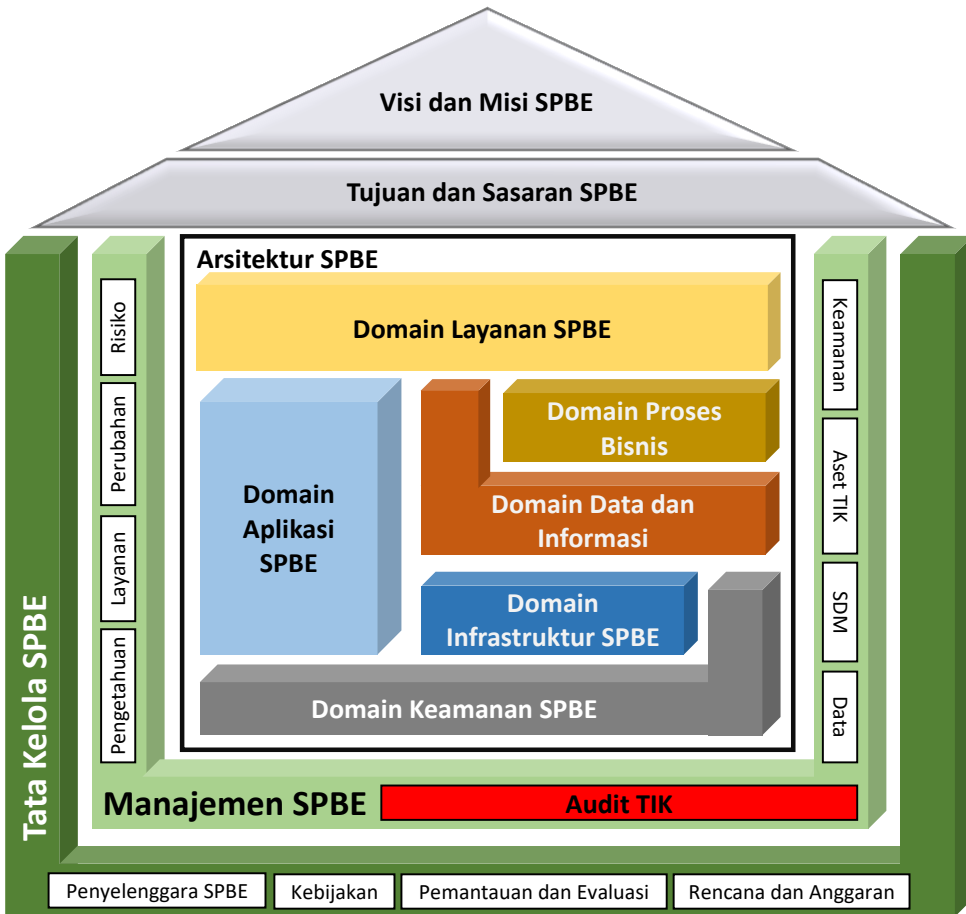
INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES



TRANSFORMASI DIGITAL

* Data Kementerian KOMINFO

KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



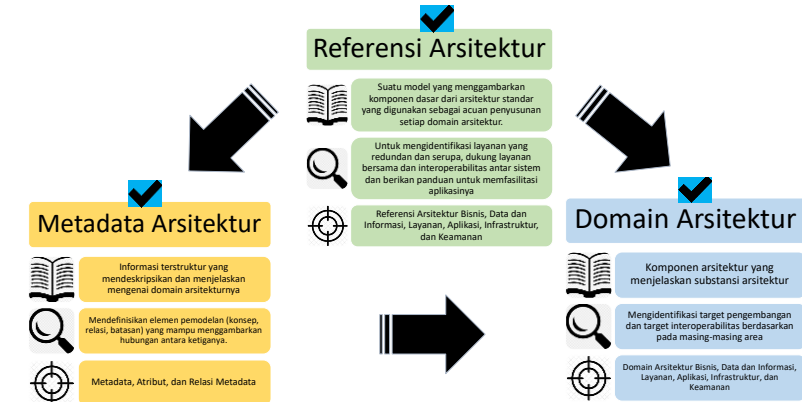
PRINSIP

- Efektivitas
- Keterpaduan**
- Kesinambungan
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Interoperabilitas
- Keamanan

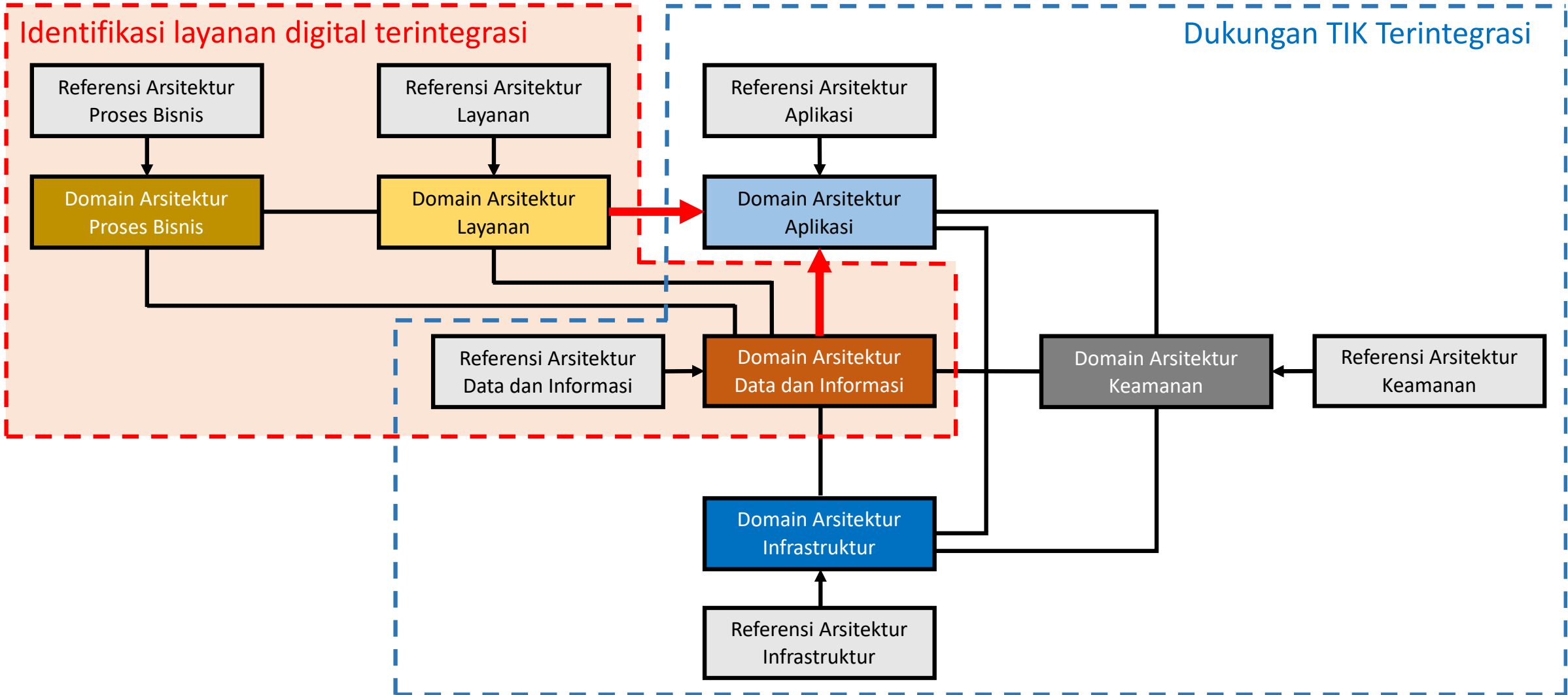
MANFAAT



- Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
- Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi**
- Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)**
- Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**
- Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
- Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**



KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE



TUJUAN PEMETAAN ANTAR DOMAIN

Proses Bisnis

- Pemetaan proses bisnis utama pada level instansi.
- Memberikan indikasi awal mengenai keterkaitan proses antar instansi.

Layanan

- Identifikasi layanan baik administrasi pemerintahan maupun layanan publik.
- Memberikan gambaran awal alur layanan dan informasi yang dibutuhkan.

Data dan Informasi

- Pemetaan data dan informasi yang dibutuhkan.
- Pemetaan sumber data dan sumber informasi yang dapat saling berkaitan.

Aplikasi

- Pemetaan aplikasi yang dapat saling berkaitan.
- Memberikan potensi integrasi aplikasi pemerintahan.

Infrastruktur

- Memudahkan penyelarasan pemilihan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan siklus hidup TI secara keseluruhan

Keamanan

- Menyelaraskan standard keamanan dan aksesibilitas antar aplikasi dan basis data.

PROSES PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE

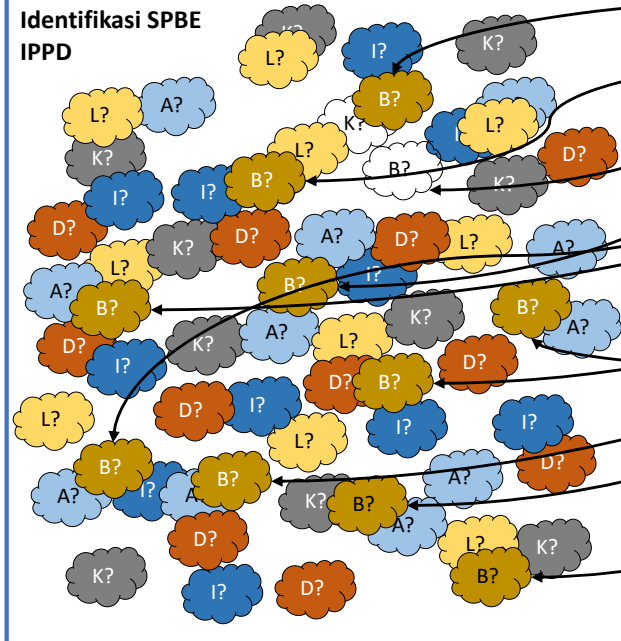
- Peraturan dan perundang-undangan
- Kajian/referensi teknologi TIK, dll

- RPJPN, RPJMN
- RPJMD/Renstra
- Katalog Data, Aset TIK
- Monitoring dan Evaluasi
- Audit TIK, dll

Visi dan Misi Penyelenggaraan SPBE

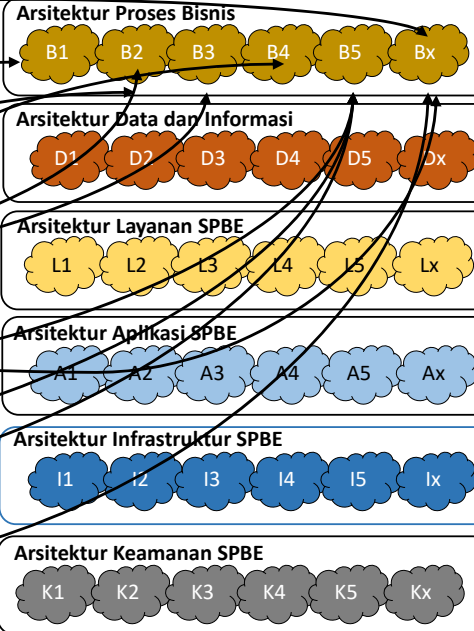
1

Identifikasi SPBE IPPD

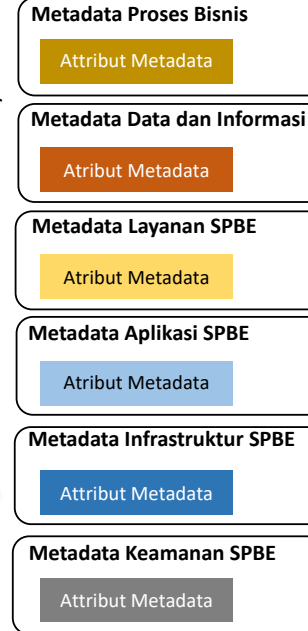


2

Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

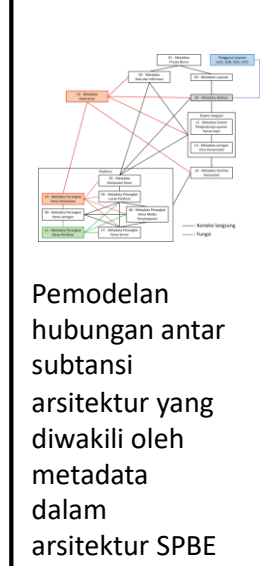


Pemodelan subansi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya



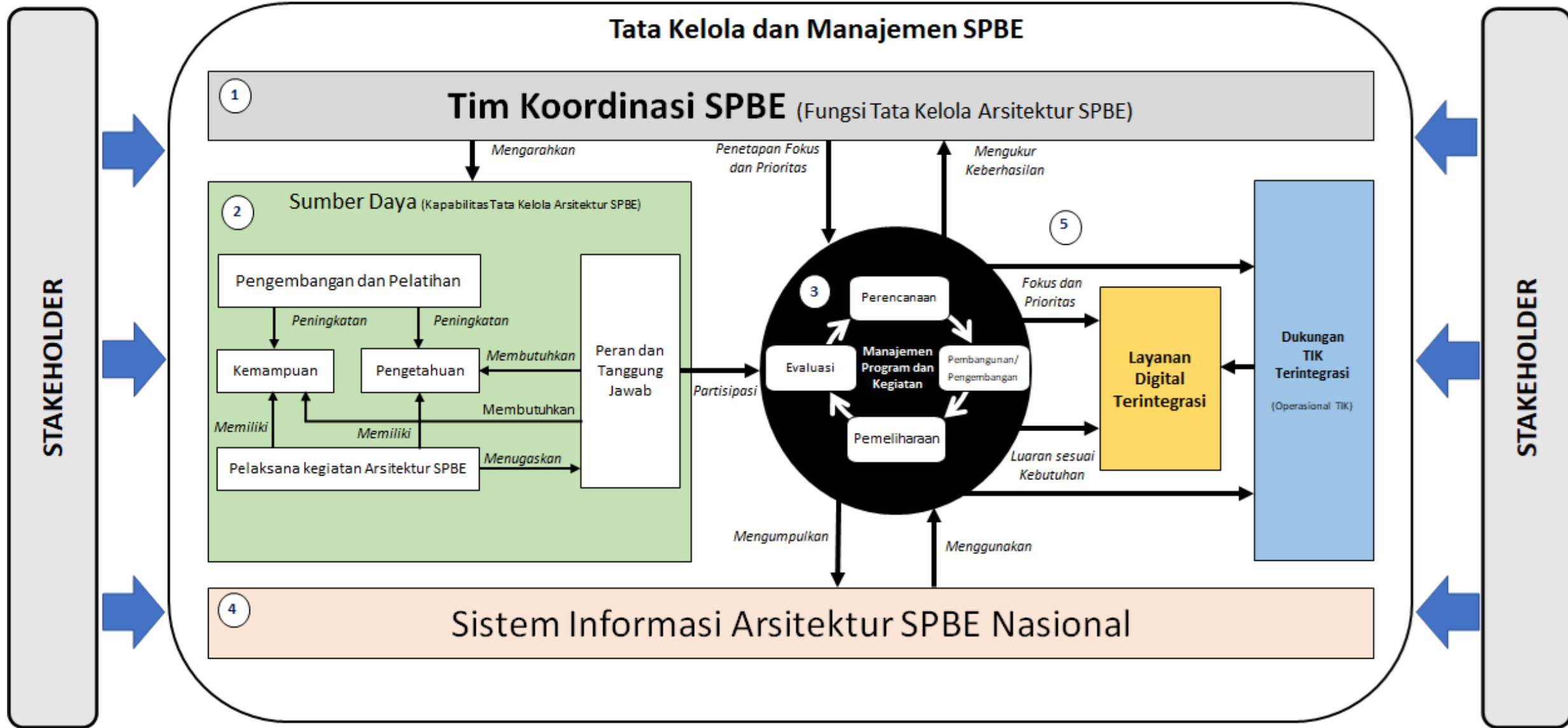
Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan

Metamodel Arsitektur SPBE



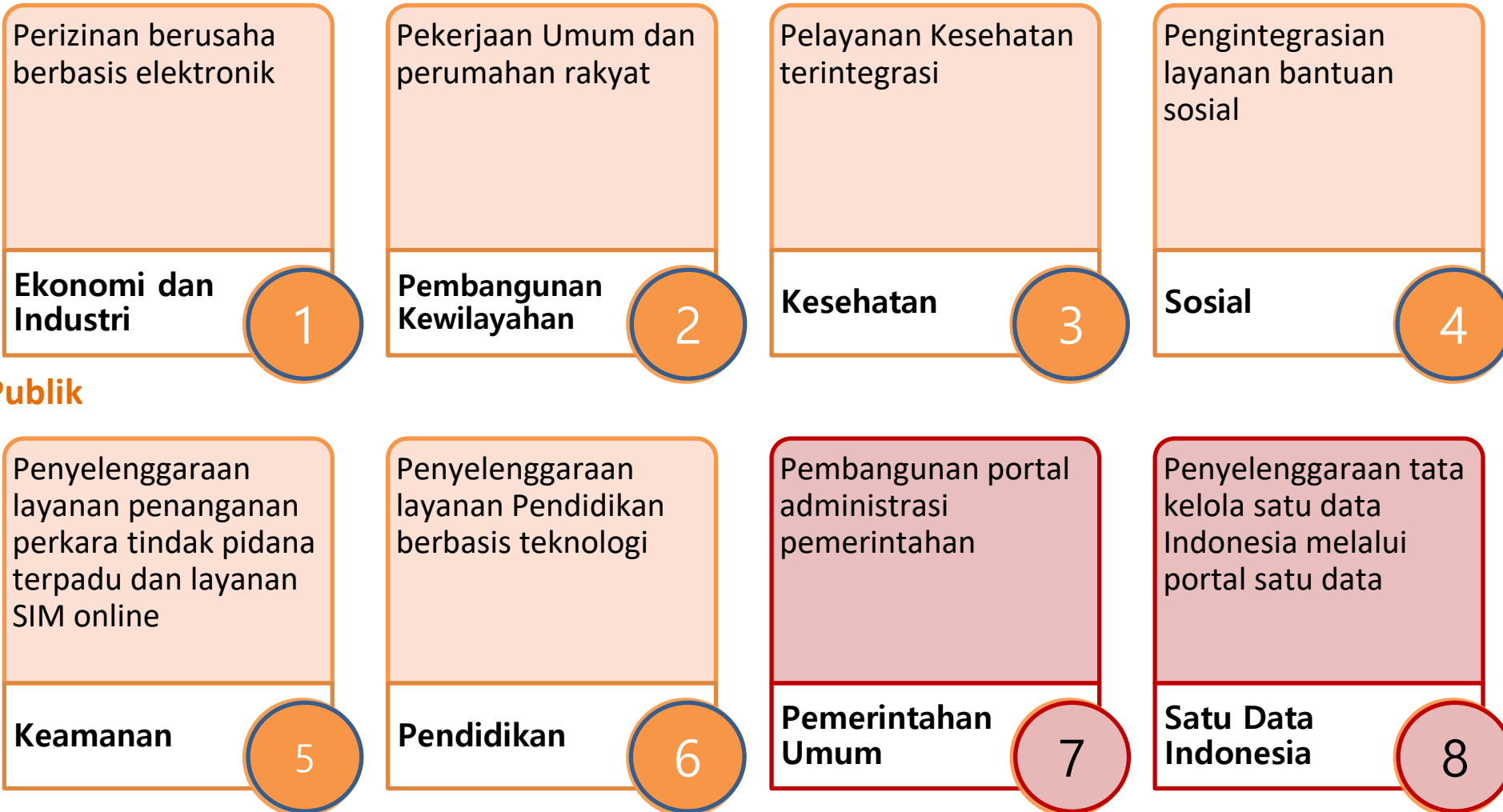
3

Arsitektur SPBE



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

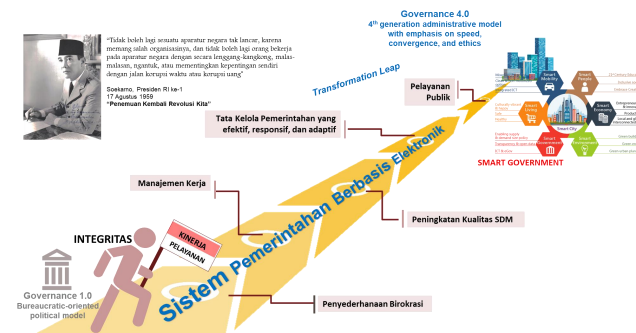
Target inisiatif strategis pada Rancangan Perpres Arsitektur SPBE Nasional (2022 – 2025)



Pelayanan Publik

Pelayanan Administrasi Pemerintahan

TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI PENERAPAN SPBE



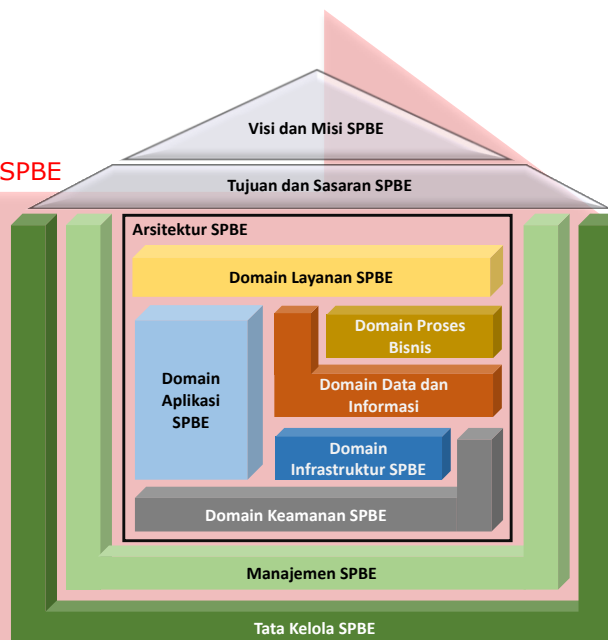
- Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
- Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi

KERANGKA SPBE

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE



Old Public Administration

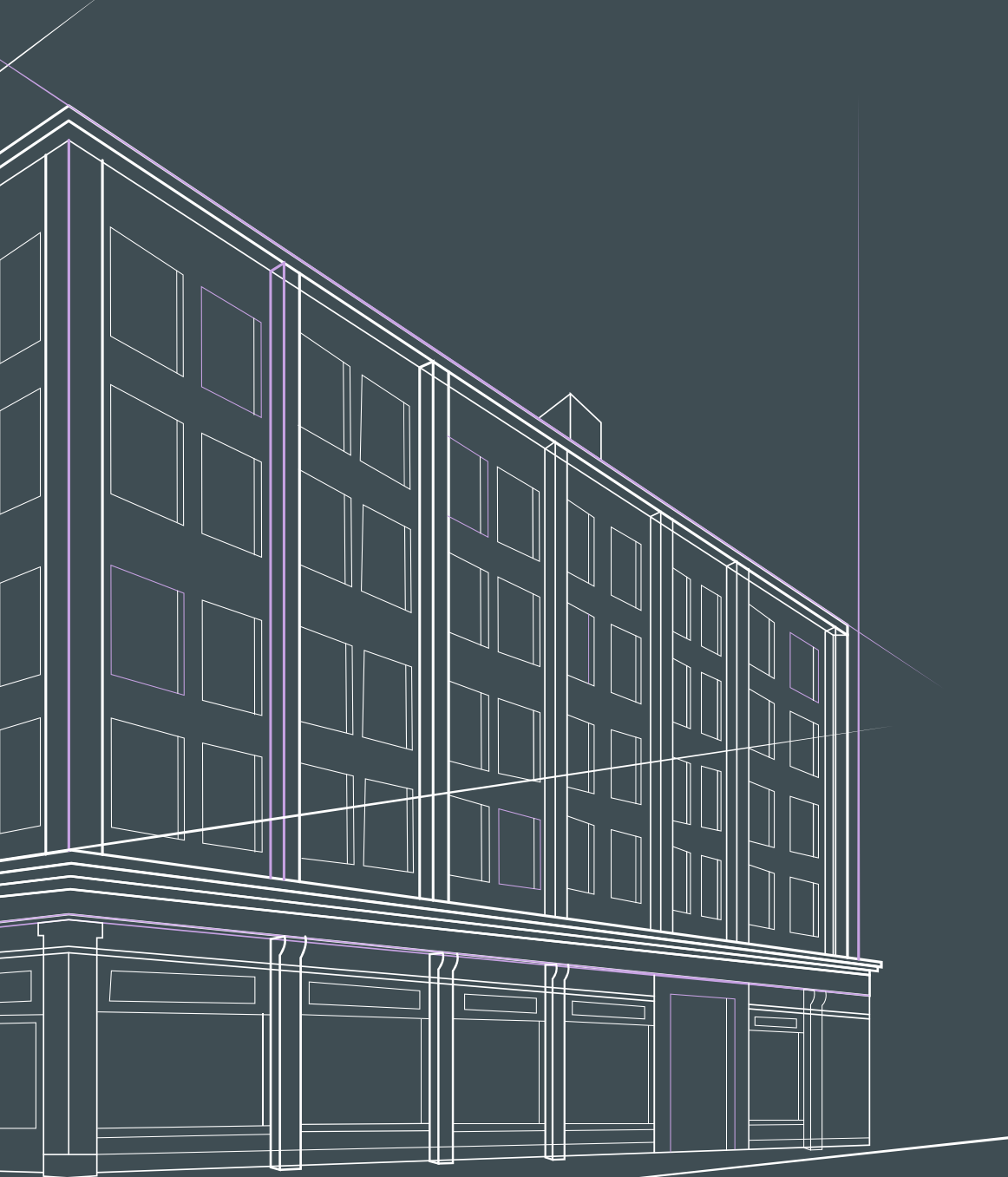


ARSITEKTUR SPBE



- Menerapkan **standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan** digital Nasional (*Service Level Agreement*)
- Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**

- Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru



3

KERANGKA KERJA EKOSISTEM DIGITAL



KERANGKA KERJA EKOSISTEM DIGITAL

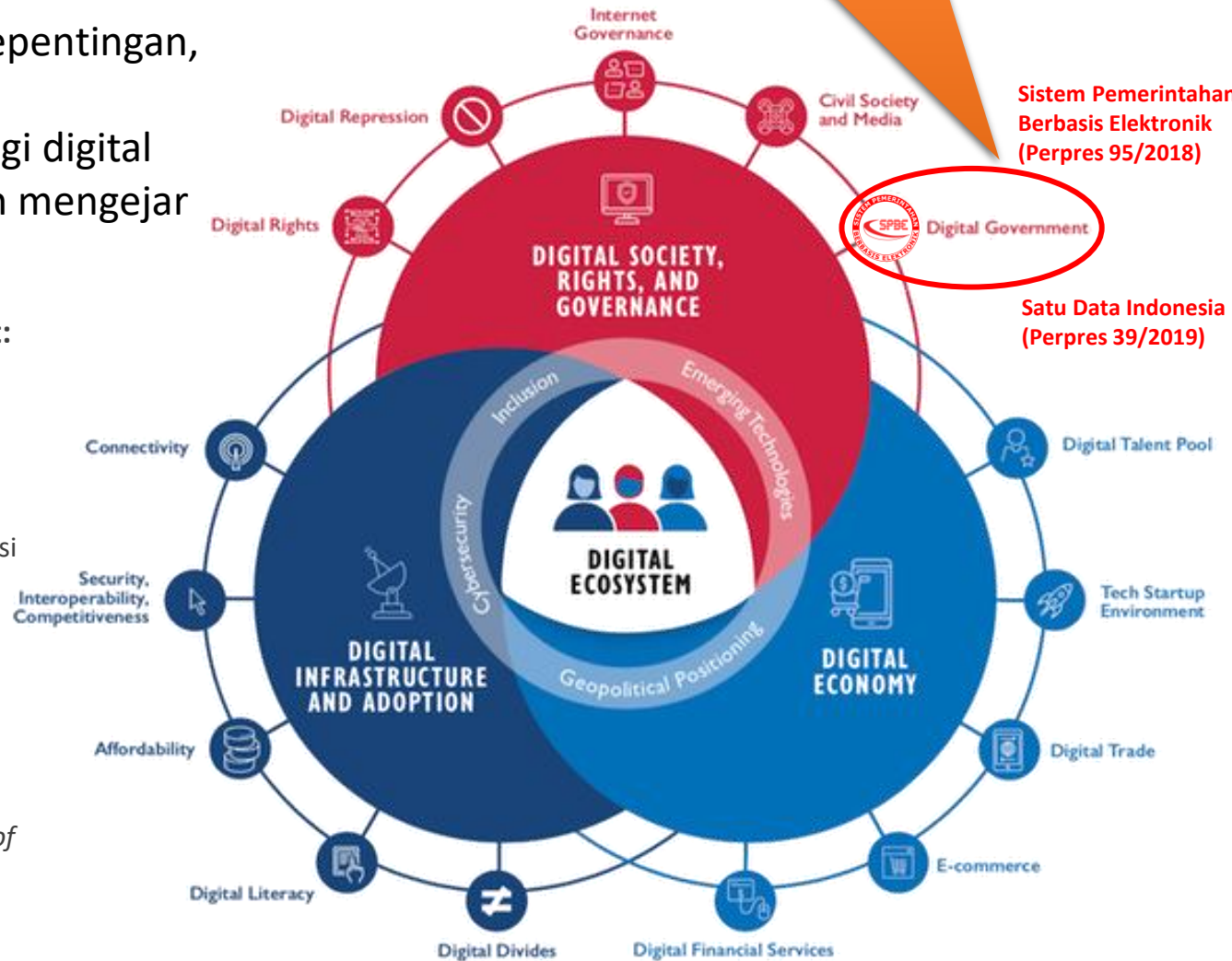
Ekosistem digital terdiri dari berbagai macam pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan yang saling mendukung, dengan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengakses layanan, interaksi dalam masyarakat, dan mengejar peluang ekonomi.

Kerangka kerja Ekosistem Digital terbentuk dari 3 area yang saling terkait:

1. **Area Infrastruktur Digital dan Adopsi** : sumber daya yang memungkinkan sistem digital, masyarakat, serta organisasi untuk mengakses dan menggunakan infrastruktur digital.
2. **Masyarakat Digital, Hak, dan Tata Kelola**: interaksi teknologi digital dengan pemerintah, masyarakat, dan media.
3. **Ekonomi Digital**: peran teknologi digital dalam meningkatkan peluang dan efisiensi ekonomi

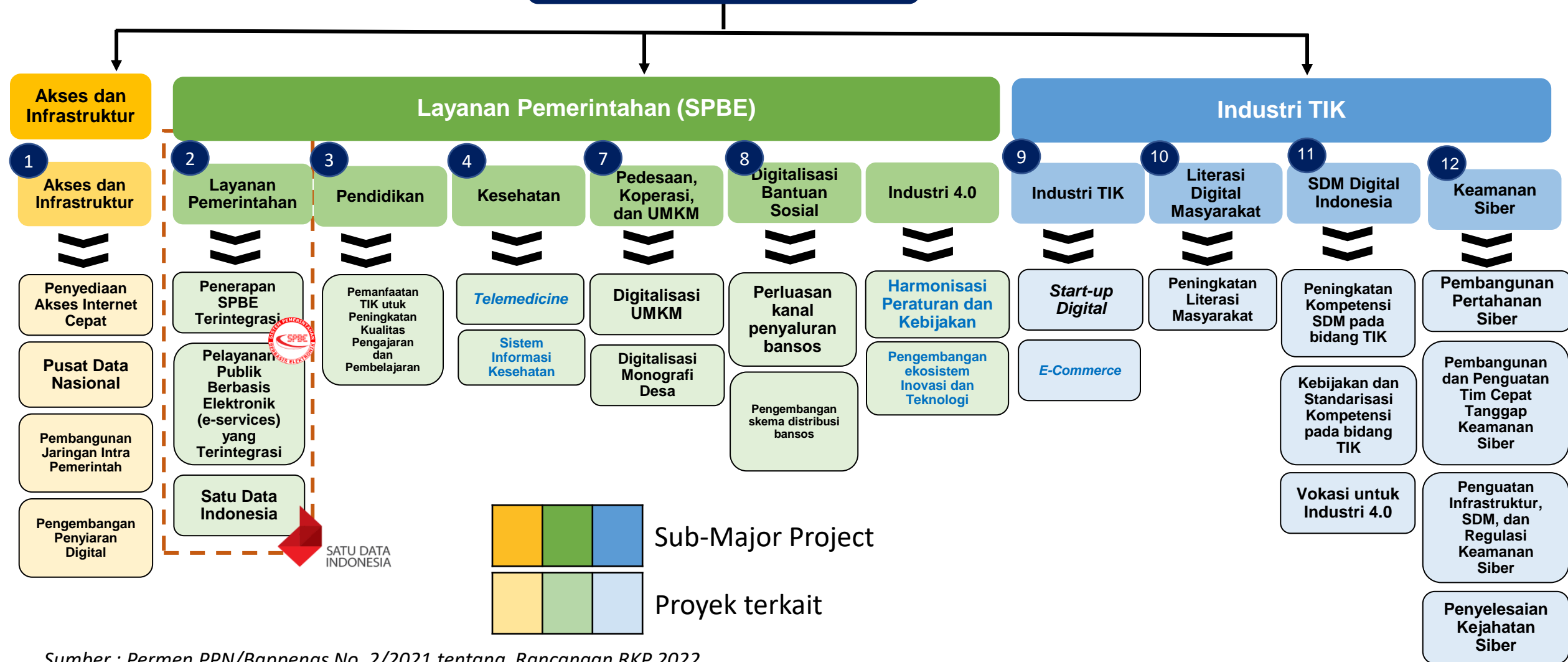
Kerangka kerja Ekosistem Digital mencakup 4 topik lintas area:

1. **Inklusi**: mengurangi disparitas dalam akses dan “kesenjangan digital”
2. **Keamanan siber**: melindungi informasi dari kerusakan, penggunaan atau modifikasi yang tidak sah, atau eksploitasi, serta ancaman keamanan informasi lainnya.
3. **Tren Teknologi (Emerging Technologies)**: mencakup kecerdasan buatan, *Internet of Things*, *blockchain*, 5G, dan teknologi baru lainnya.
4. **Geopolitik**: strategi geopolitik untuk berperan aktif dalam membentuk ruang digital global.

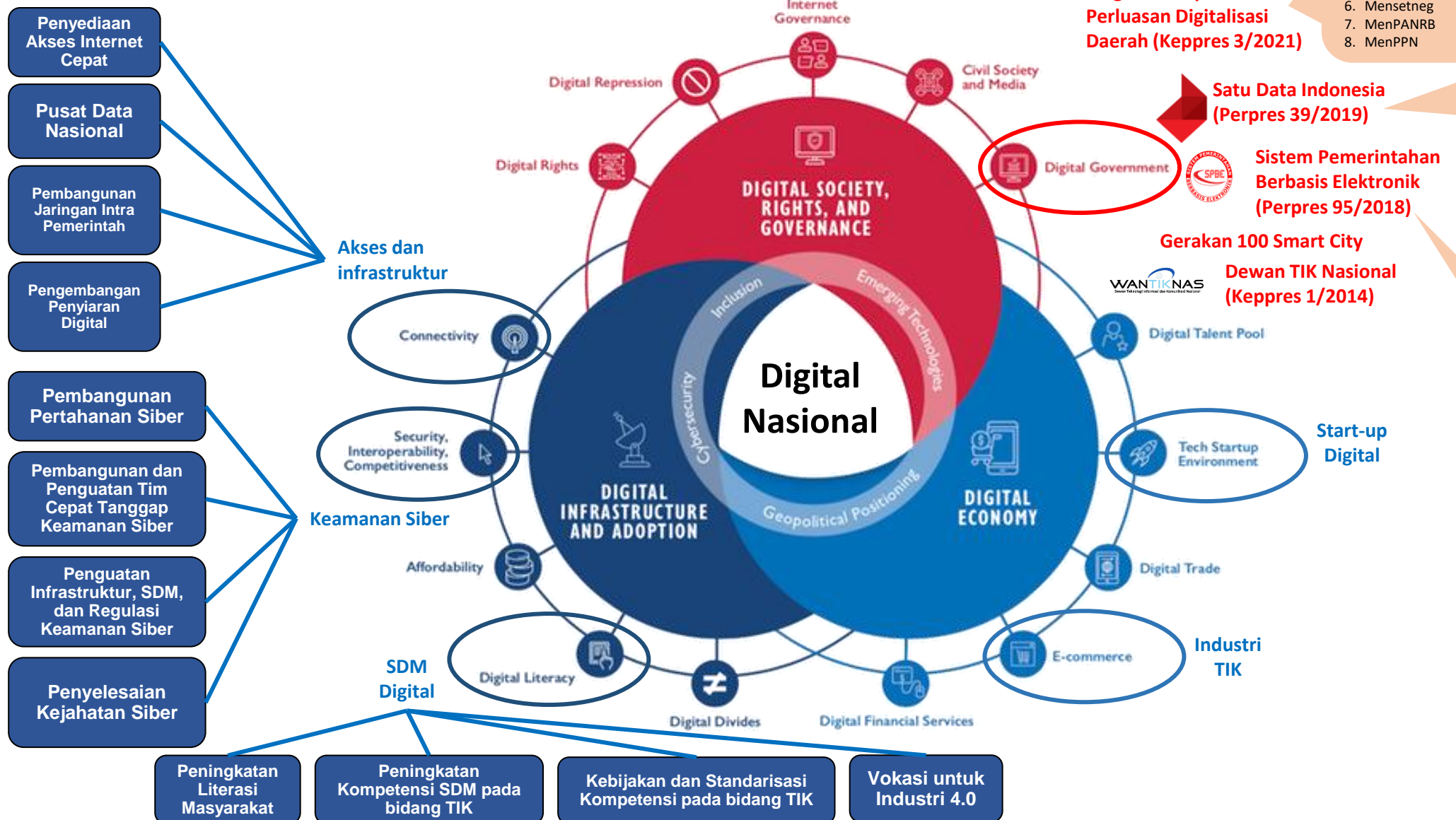


USAID Digital Ecosystem Framework

Transformasi Digital



EKOSISTEM DIGITAL NASIONAL (KERANGKA REGULASI PEMERINTAH)



Satgas P2DD

1. Menko Perekonomian
2. Gubernur BI
3. Mendagri
4. Menkeu
5. Menkominfo
6. Mensetneg
7. MenPANRB
8. MenPPN

Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Keppres 3/2021)

Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018)

Gerakan 100 Smart City

Dewan TIK Nasional (Keppres 1/2014)

Dewan Pengarah SDI

1. MenPPN
2. MenPANRB
3. Menkominfo
4. Menkeu
5. Mendagri
6. Ka. BIG
7. Ka. BPS

Tim Koordinasi SPBE Nasional

1. MenPANRB
2. MenPPN
3. Menkominfo
4. Menkeu
5. Mendagri
6. Ka. BSSN
7. Ka. BRIN

TAHAPAN PENERAPAN SPBE

FASE TRANSFORMASI

Capaian

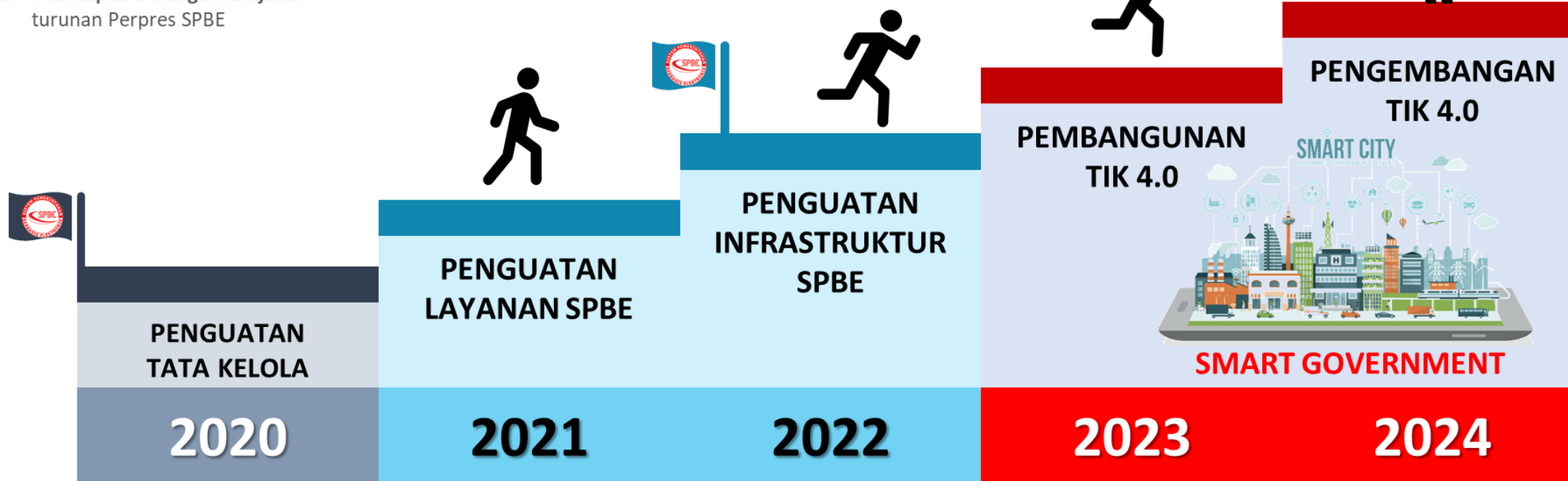
1. Peningkatan rata-rata indeks SPBE, tahun 2018: 1,98 (kurang) tahun 2019: 2,18 (cukup) tahun 2020: 2,26 (Cukup) dengan indikator penilaian baru, berprinsip keterpaduan nasional
2. Kenaikan 19 peringkat e-Government Development Index (UN), tahun 2018: 107, menjadi tahun 2020: 88
3. Penetapan berbagai kebijakan turunan Perpres SPBE

FASE TRANSFORMASI

- Terwujudnya **proses bisnis terintegrasi** melalui penerapan **Arsitektur SPBE**
- Terwujudnya **tematik layanan**
- Pemanfaatan **infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai**
- **Peningkatan literasi digital** (Manajemen ASN Digital)

SMART Government

- Penerapan penuh **layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional**
- Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (**Data-Driven Government**)
- Mewujudkan **konsep Smart City** dengan pola kerja digital (**New Way of Working**) pada operasional di Kota Nusantara tahun 2024





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**



buku saku SPBE

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR KEMENPAN RB

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



01. Introducing e-government transformation

SEKILAS MASA DEPAN DIGITAL GOVERNMENT INDONESIA

🎯 Dari sisi masyarakat

Ilustrasi masyarakat menggunakan layanan pemerintah menggunakan aplikasi di HP sambil sarapan.



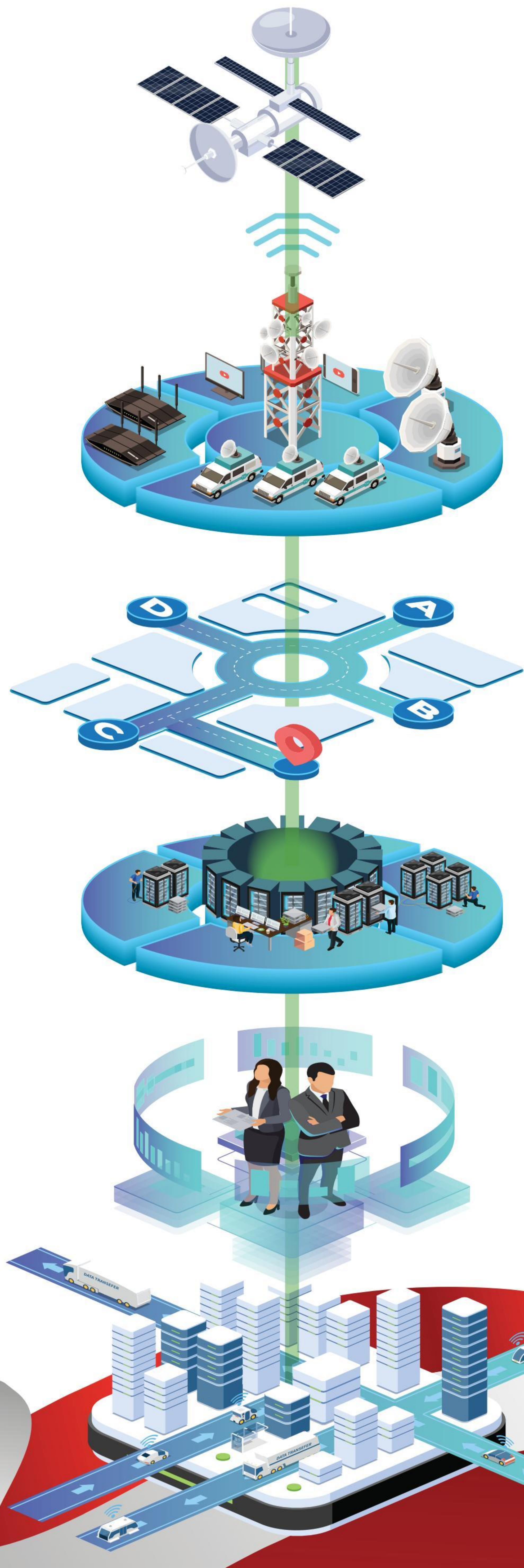


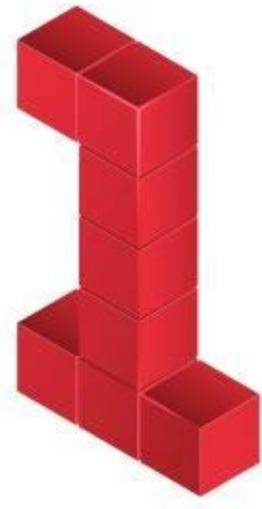
🎯 Dari sisi Pemerintah

Ilustrasi ASN mengerjakan surat edaran di dalam pesawat, saat tiba sudah selesai hingga tanda tangan.

BAGAI MANA KITA MENCAPAI **TUJUAN SPBE?**

Ada 5 langkah
percepatan
Transformasi digital
yang dicantumkan
dalam mandat Presiden
Joko Widodo





“Segera lakukan percepatan **perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital** dan penyediaan layanan internet”



“Persiapkan **roadmap transformasi digital** di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, Pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.”



“Percepat **integrasi pusat data nasional**”



“Siapkan kebutuhan **SDM talenta digital**”



“Yang berkaitan dengan **regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan** segera disiapkan secepat-cepatnya.”

PERAN PEMERINTAH DALAM TRANSFORMASI DIGITAL



Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dalam Transformasi Digital Pemerintah dalam Transformasi Digital

Pemerintahan Digital yang dikelola melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian dari Ekosistem Digital Indonesia.

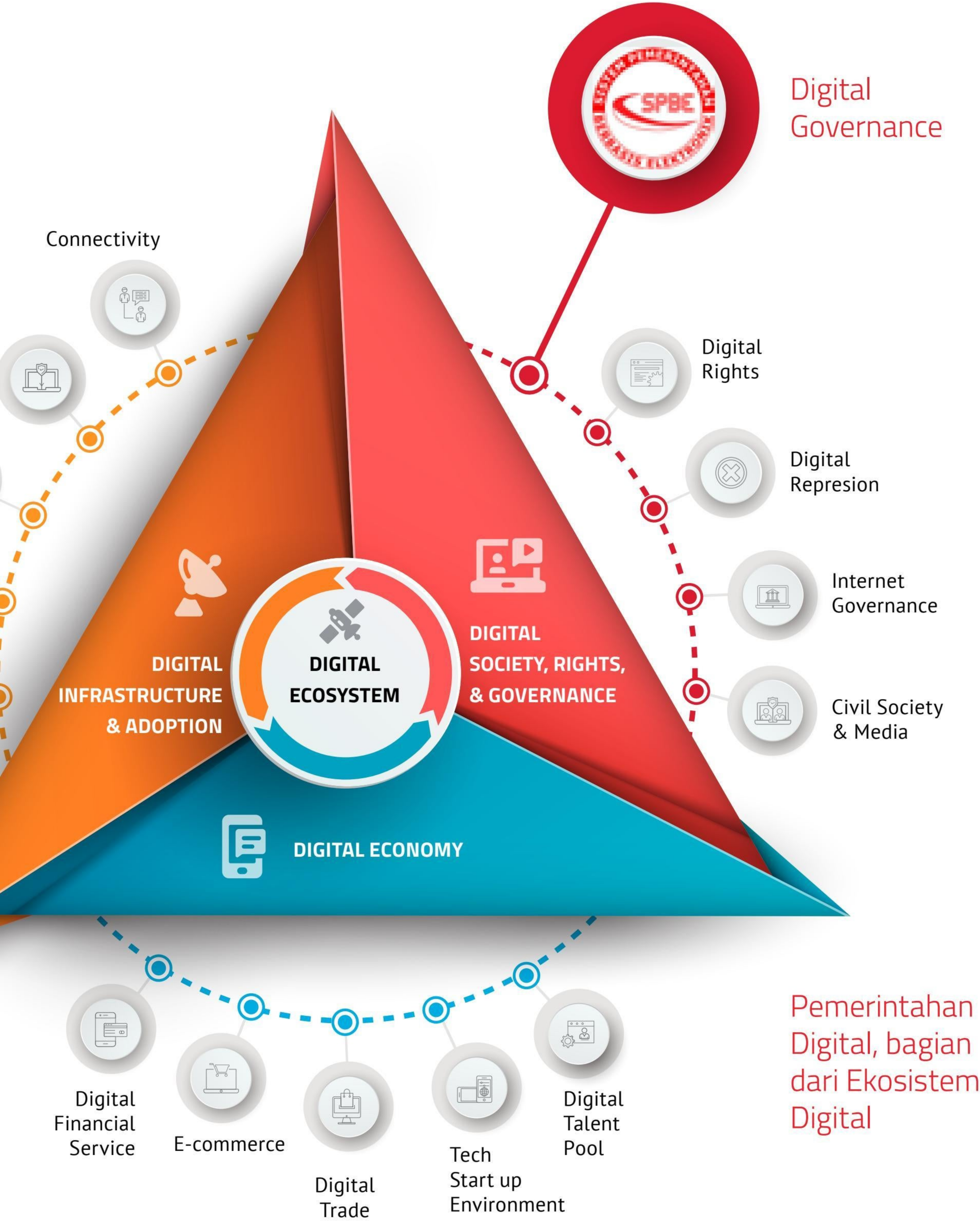
Ekosistem Digital Indonesia merupakan integrasi dari infrastruktur dan adopsi digital, ekonomi digital, dan masyarakat, hak & tata kelola digital, dengan tata Kelola merupakan tanggung jawab dari SPBE.

Security
Interoperability
Competitiveness

Affordability

Digital
Literacy

Digital
Divides



KERANGKA KERJA REGULASI

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital, kerangka kerja regulasi adalah berdasar pada



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun/ 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden 95/2018 merupakan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan terpadu kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE berdasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat di [sini](#).



Menteri
PPN/
Bappenas



Menteri
Keuangan



Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun/ 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden 39/2019 tentang Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di [sini](#)



TIM KOORDINASI
SPBE NASIONAL

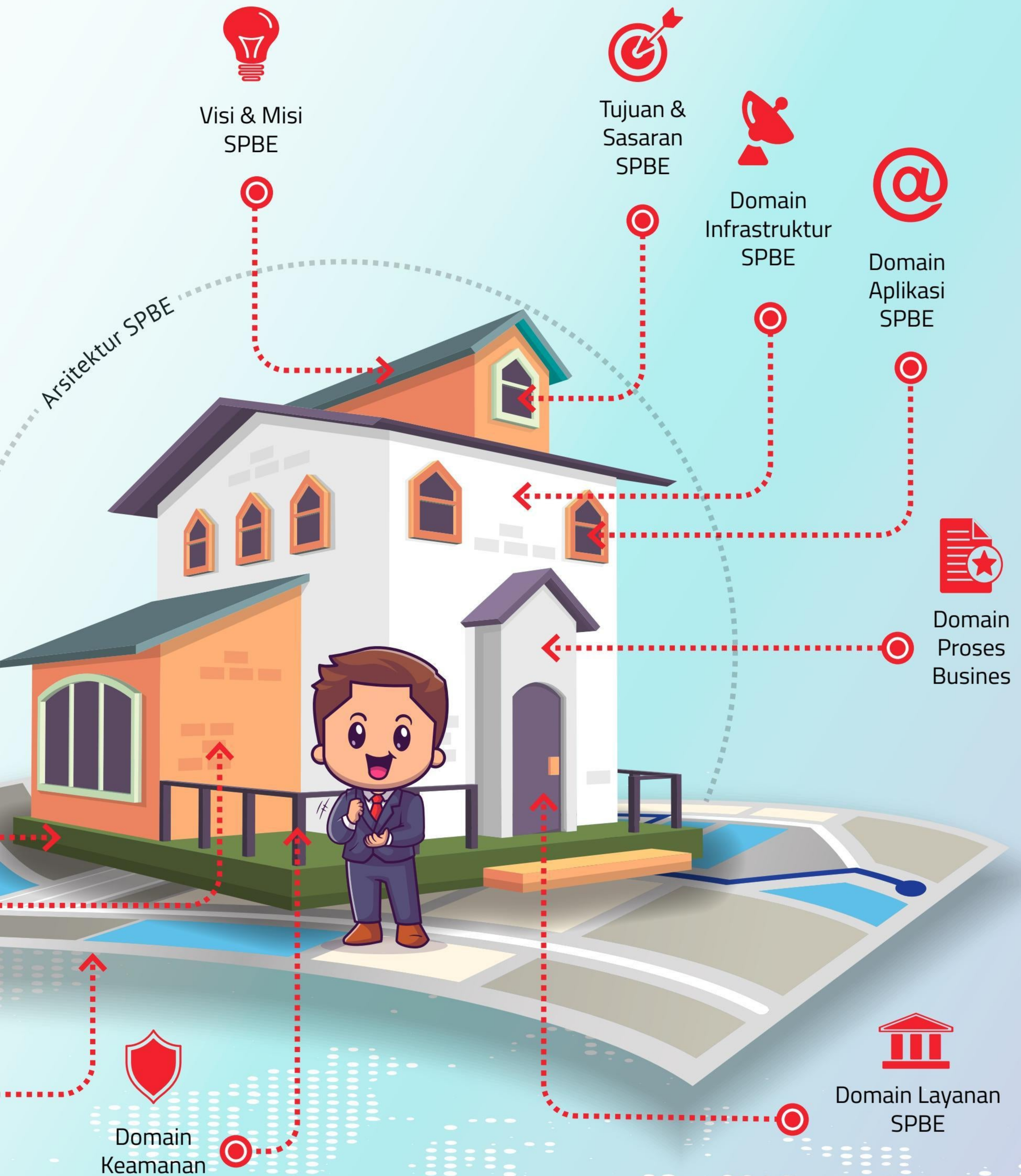
MARI KITA PAHAMIKANSEPT DAN DEFINISI TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan kebijakan, proses, dan teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna dengan lebih baik.

Pengambilan keputusan berbasis bukti dan teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan pengalaman penerima layanan pemerintah pengguna melalui sistem front-end maupun back-end. Cara kerja baru ini mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan beradaptasi sesuai ekspektasi masyarakat di dunia yang cepat berubah.

Lewat transformasi digital, instansi dapat mengubah caranya beroperasi dan menghasilkan nilai lebih bagi masyarakat pengguna. Transformasi digital menciptakan efisiensi dan menghemat biaya karena berfokus dalam mendesain dan membangun solusi yang tepat.





Tahukah Anda apa saja yang menjadi ciri-ciri dari transformasi digital dan yang bukan?



Ciri-ciri utamanya adalah

- ☒ berpusat pada pengguna
- ☒ inovasi
- ☒ niat untuk berubah
- ☒ pengembangan keterampilan dan kapabilitas baru di seluruh organisasi
- ☒ berbasis bukti
- ☒ berbasis data
- ☒ dibantu teknologi



Sedang yang bukan

- ☒ Hanya mengubah proses sistem berbasis kertas menjadi digital tidak lebih dari digitalisasi transaksi atau proses berbasis kertas
- ☒ terbatas pada tim teknologi
- ☒ keterampilan tersekat-sekat dan tim fungsi tunggal
- ☒ berfokus pada hasil keluaran
- ☒ perubahan yang dilakukan hanya aplikasi teknologi baru



MEMULAI TRANSFORMASI DIGITAL DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN INDONESIA

Transformasi berawal dari membangun kesadaran sarana, praktik, dan pola pikir digital. Setelah itu baru organisasi Baru kemudian, membangun kapabilitasnya.

Tidak ada solusi universal untuk transformasi digital, dan tiap instansi organisasi akan berada pada tahap yang berbeda ketika memulai transformasi digital waktu memulai perjalanan.



Selain itu, perubahan pendekatan diperlukan di berbagai aspek pemerintahan, termasuk:

- ⦿ model pendanaan
- ⦿ kebijakan, proses, dan peraturan perundang-undangan
- ⦿ struktur organisasi
- ⦿ pengelolaan dan perencanaan kerja
- ⦿ kebutuhan keterampilan dan kapabilitas di dalam tim maupun di seluruh organisasi



Kapabilitas digital yang relevan dengan layanan publik, antara lain:

- ⦿ Teknologi – API1, pembelajaran mesin (machine learning), kecerdasan buatan (artificial intelligence), keamanan siber (cyber security), blockchain, teknologi awan (cloud), teknologi robotik (robotics), platform, dan layanan bersama
- ⦿ Data dan analitik – analitik tingkat lanjut, digitalisasi proses, strategi, dan tata kelola
- ⦿ Pengguna – personalisasi, privasi, penelitian pengguna, perjalanan pengguna, dan peristiwa hidup
- ⦿ Desain – interaksi, konten, layanan, visual

Cara kerja – metode agile yang diskalakan, pengembangan keterampilan, kepemimpinan, kemitraan, proyek percontohan, inkubator/ laboratorium inovasi.

APA ITU AGILE?

Agile, atau kelincahan beradaptasi, adalah rangkaian prinsip, perilaku, dan pendekatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Banyak organisasi dan pemerintah kini berhasil menerapkan cara kerja agile dalam kegiatan operasional organisasinya.

Agile berarti:

- ⦿ menghasilkan produk dan layanan dengan berfokus pada capaian
- ⦿ membagi pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil
- ⦿ menguji coba, belajar dan , mengulang
- ⦿ menghasilkan nilai yang lebih cepat dan sering
- ⦿ mengambil keputusan berbasis bukti dengan menggunakan penelitian dan data

Cara kerja ini tidak lantas meningkatkan kualitas dan efisiensi. Tim yang baru memulai transformasi digital mungkin akan menghadapi kesulitan dan gangguan. Dibutuhkan latihan, disiplin, dan ketekunan untuk melihat hasilnya.

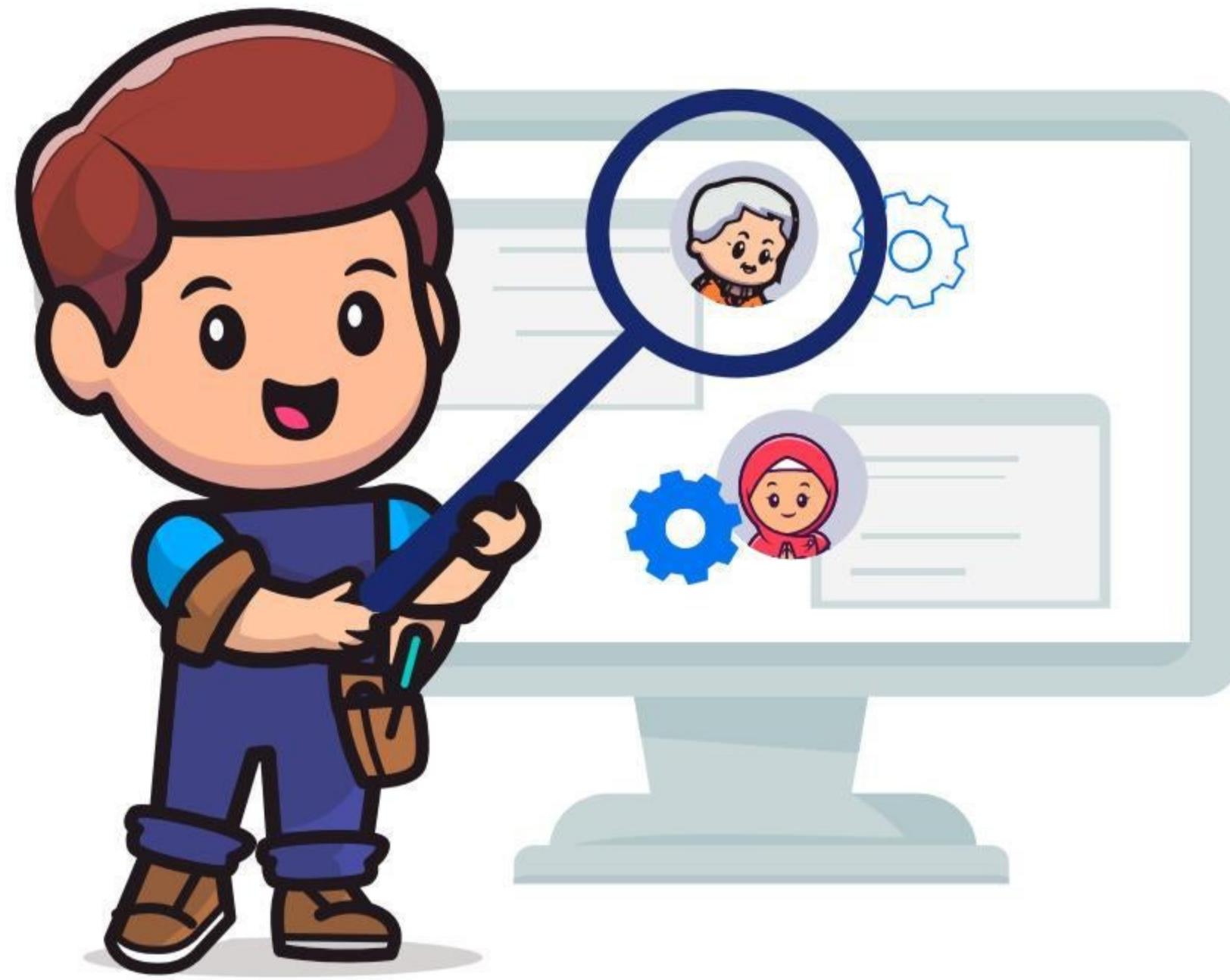


TAHUKAH ANDA ARTI DESAIN YANG **BERPUSAT PADA PENGGUNA**

Desain yang berpusat pada pengguna (UCD6) adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna dan kebutuhan pengguna.

Dalam konteks pemerintah, jika kebutuhan tidak dipenuhi, pengguna terpaksa beralih ke kanal yang lebih mahal seperti telepon dan pusat layanan. Selain itu, masalah ini dapat merusak kepercayaan publik.

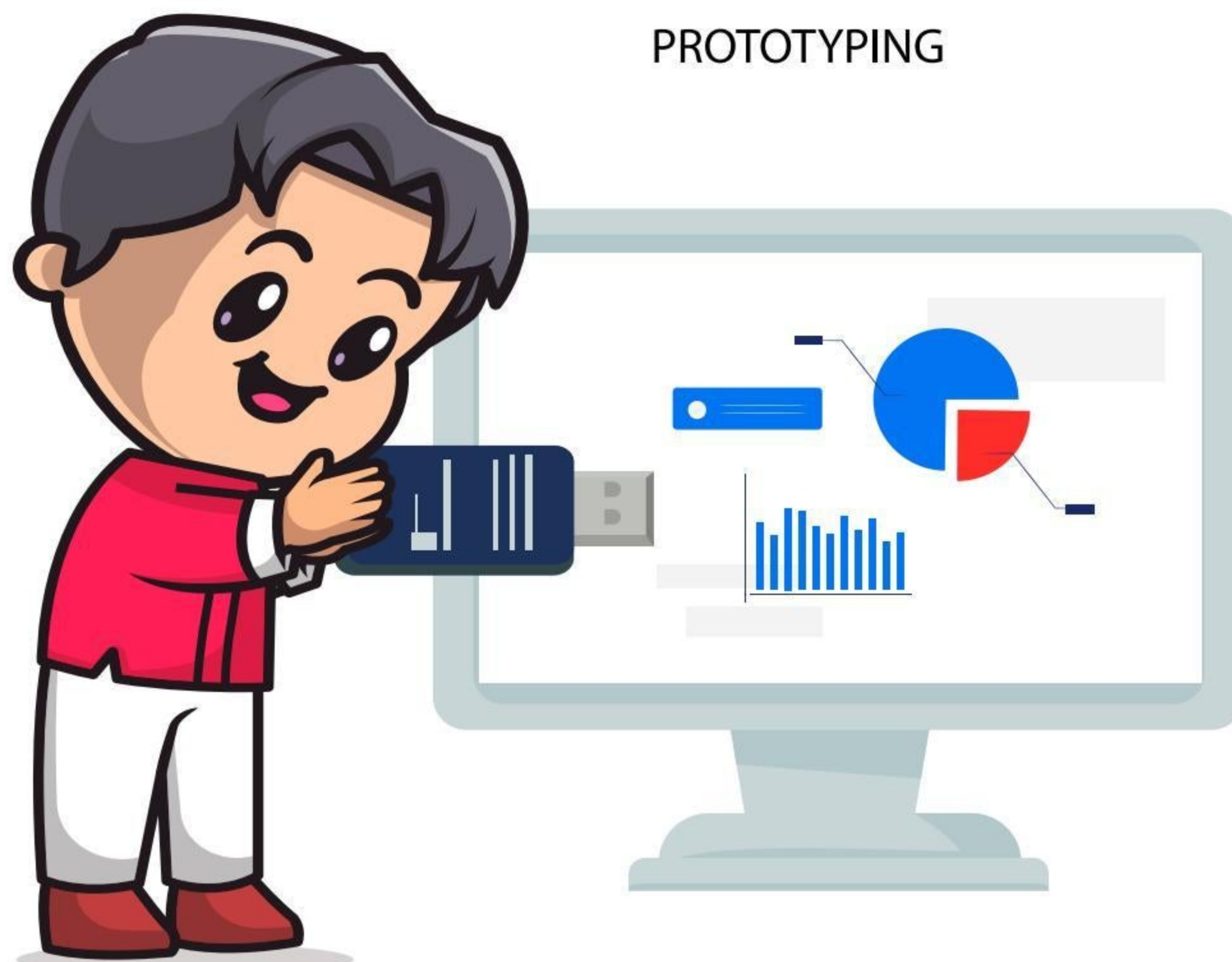
Tiap lembaga mungkin mempunyai definisi sendiri tentang ‘pengguna’. Jadi, perlu dipastikan adanya pemahaman bersama. Beberapa lembaga menganggap istilah ini berarti pengguna akhir saja, yaitu masyarakat. Namun, menurut Standar Layanan Digital, pengguna berarti setiap orang yang menggunakan atau terdampak oleh layanan (termasuk orang yang membangun, memelihara, atau bergantung pada layanan tersebut).



USER RESEARCH



PROTOTYPING



RESEARCH ANALYSIS

Ini adalah ciri-ciri dari desain yang berpusat dan yang bukan.



Apa ciri-ciri dari desain yang berpusat pada penggunaanya?

- ☒ memahami pengguna dan cara pengguna berinteraksi dengan pemerintah menggunakan sarana khusus dan teknik penelitian
- ☒ belajar tentang pengguna, menyusun hipotesis, dan menguji coba berbagai ide
- ☒ mempermudah pengguna menghasilkan capaian/ hasil
- ☒ menggunakan empati untuk memahami konteks (dan potensi hambatan) interaksi
- ☒ melakukan uji coba untuk memastikan produk berfungsi bagi pengguna



Apa yang bukan ciri-ciri dari desain yang berpusat pada pengguna?

- ☒ membuat asumsi tentang pengguna dan kebutuhan pengguna
- ☒ menuruti semua keinginan pengguna
- ☒ hanya memperhatikan pengguna akhir
- ☒ merasa kasihan kepada pengguna
- ☒ tidak mematuhi kebutuhan pengguna menjalankan aktivitas kepatuhan
- ☒ berasumsi mengenai masalah layanan yang ditawarkan produk





Serukan?!...

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Buku saku SPBE tidak akan mungkin terwujud
tanpa dukungan dari Program Kemitraan
Indonesia Australia untuk Perekonomian
PROSPERA



Untuk bacaan lebih lanjut silahkan
kunjungi:

https://spbe.higilabs.com/?page_id=6#learning



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PROSPERA

Australia Indonesia Partnership
for Economic Development

PRESENTASI MAHASISWA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan e-Government

Tujuan Kegiatan

- Melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan topik lanjutan SPBE secara mendalam.
- Mengembangkan keterampilan presentasi profesional dan komunikasi ilmiah.
- Mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap implementasi nyata e-Government dan SPBE di Indonesia.
- Meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran berbasis penelitian.

Instruksi untuk Mahasiswa

- Setiap mahasiswa **memilih 1 topik** dan:
 - 1. Menyusun PowerPoint** berisi 10–15 slide dengan desain profesional dan isi yang sistematis.
 - 2. Melakukan pencarian data/literatur terkini** dari sumber resmi seperti:
 1. Website KemenPANRB, Kominfo, BSSN, dan Kemenkeu.
 2. Jurnal, artikel, atau laporan evaluasi SPBE nasional.
 - 3. Menambahkan contoh nyata**, studi kasus, atau analisis kebijakan yang relevan.
 - 4. Mempresentasikan** materi tersebut dilanjutkan **diskusi tanya jawab**.

Pembagian Materi per Mahasiswa

No	Topik Materi	Deskripsi Singkat	Tugas Mahasiswa
1	Integrasi dan Interoperabilitas Layanan SPBE	Menjelaskan pentingnya interoperabilitas data antar instansi, arsitektur integrasi nasional, dan konsep Government Service Bus (GSB).	Buat slide berisi konsep integrasi SPBE, studi kasus sukses, dan tantangan implementasi (misalnya perbedaan standar data).
2	Manajemen Data dan Keamanan Informasi Pemerintah	Fokus pada tata kelola data, klasifikasi data publik vs rahasia, serta keamanan siber pemerintahan.	Bahas peraturan BSSN, konsep keamanan berlapis, enkripsi data, dan studi kasus kebocoran data di instansi publik.
3	Infrastruktur dan Teknologi Pendukung SPBE	Menjelaskan peran pusat data nasional, jaringan intra-pemerintah, cloud pemerintah (GovCloud), dan server keamanan.	Analisis perkembangan Pusat Data Nasional (PDN) dan risiko teknis dalam infrastruktur SPBE.
4	Smart Governance dan Inovasi Layanan Publik Digital	Membahas bagaimana SPBE menjadi pondasi Smart Government atau Smart City.	Jelaskan contoh inovasi seperti Smart City Bandung, Jogja Smart Province, atau Smart Village.
5	Evaluasi dan Audit SPBE (Penilaian Maturitas)	Menganalisis kerangka penilaian SPBE, indikator, dan metode audit yang digunakan oleh KemenPANRB.	Tampilkan hasil penilaian SPBE beberapa instansi, serta bagaimana memperbaikinya.
6	Manajemen Perubahan dan Kapasitas SDM Digital Pemerintahan	Membahas strategi perubahan organisasi, budaya digital, dan peningkatan kompetensi ASN digital.	Analisis program pelatihan digital ASN (Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy, dll).
7	Refleksi dan Rekomendasi Strategi SPBE di Masa Depan (UAS Presentasi)	Setiap mahasiswa menyimpulkan pelajaran dari seluruh topik dan menyusun rekomendasi kebijakan penguatan SPBE nasional.	Presentasi reflektif: “Bagaimana SPBE Indonesia 2030 seharusnya berjalan?” — berbasis hasil diskusi dan riset pribadi.

Rubrik Penilaian Presentasi Mahasiswa

Aspek Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian
1. Kualitas Materi & Pemahaman Konsep	30%	Menunjukkan pemahaman mendalam terhadap topik SPBE yang dibahas; mampu menjelaskan konsep, regulasi, dan implementasi dengan jelas serta relevan.
2. Analisis Kritis & Argumentasi	25%	Mampu menganalisis data, mengaitkan teori dengan praktik nyata, serta memberikan pandangan kritis dan solusi atas tantangan SPBE.
3. Desain & Struktur PowerPoint	15%	Slide tersusun rapi, profesional, sistematis (10–15 slide), dengan tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami.
4. Penyampaian & Gaya Presentasi	20%	Komunikatif, percaya diri, penguasaan bahasa baik, serta mampu menarik perhatian audiens. Waktu presentasi efektif (10–15 menit).
5. Keterlibatan & Diskusi	10%	Aktif menjawab pertanyaan, memancing diskusi, dan berkontribusi dalam tanya jawab dengan argumentasi yang logis.

Penutup

- Setiap mahasiswa berperan sebagai peneliti dan pembelajar aktif dalam memahami SPBE dan e-Government.
- Gunakan kesempatan ini untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analisis kebijakan, dan komunikasi profesional.
- Ingat: Tujuan utama bukan hanya mendapatkan nilai, tetapi membangun pemahaman dan kontribusi nyata terhadap transformasi digital pemerintahan Indonesia.
- Mari kita jadikan sesi ini sebagai wadah belajar kolaboratif dan saling menginspirasi.



Tugas Praktik Lapangan — Evaluasi Efektivitas SPBE

1. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa melakukan **evaluasi langsung terhadap penerapan SPBE atau e-Government** di instansi pemerintahan (bisa kantor kelurahan, dinas, atau layanan publik digital) dengan menggunakan **empat metode utama evaluasi SPBE**, yaitu:

- a **Survei dan Kuesioner**
- b **Wawancara dan FGD (Focus Group Discussion)**
- c **Analisis Data Sistem**
- d **Benchmarking**

2. Langkah-Langkah Kegiatan Mahasiswa

a. Menentukan Lokasi/Objek Studi

1. Pilih satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem digital (misalnya: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Samsat, Dinas Perizinan, Kelurahan, atau aplikasi seperti e-KTP, e-Samsat, e-Lapor, dll).
2. Setiap kelompok terdiri dari **3–5 mahasiswa**.

b. Survei dan Kuesioner

1. Buat **kuesioner singkat (5–10 pertanyaan)** yang mengukur kepuasan pengguna layanan digital.
Contoh indikator: kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, kepuasan keseluruhan.
2. Sebarkan kepada minimal **10 responden** (masyarakat pengguna layanan tersebut).
3. Olah hasilnya dalam bentuk **tabel dan grafik**.

c. Wawancara dan FGD

1. Lakukan wawancara dengan minimal **1 orang pegawai/stakeholder** di instansi tersebut.
2. Bahas mengenai:
 - Tantangan dalam penerapan sistem digital.
 - Persepsi mereka terhadap efektivitas SPBE.
 - Usulan perbaikan dari sisi instansi.
3. Rekam hasil wawancara dalam bentuk **ringkasan naratif** (1–2 halaman).

d. Analisis Data Sistem

1. Jika memungkinkan, minta atau observasi data sederhana seperti:

- Jumlah pengguna layanan digital per hari/minggu.
 - Waktu rata-rata pelayanan.
 - Data error, downtime, atau trafik kunjungan situs.
2. Buat **analisis deskriptif singkat** berdasarkan data tersebut (misalnya: grafik perbandingan waktu atau jumlah pengguna).

e. Benchmarking

1. Bandingkan hasil dari instansi yang diteliti dengan instansi lain yang serupa (bisa dari sumber online atau laporan publik).
2. Tulis kesimpulan perbandingan dalam 1 halaman:
 - Apa kelebihan dan kekurangannya?
 - Bagaimana posisi instansi yang diteliti dibandingkan dengan standar nasional SPBE?

Format Laporan Akhir

1. Halaman Judul

- a. Judul: *Laporan Evaluasi Efektivitas SPBE — Studi Lapangan*
- b. Nama Anggota Kelompok
- c. NIM, Program Studi, Universitas
- d. Nama Dosen Pengampu
- e. Tanggal Pengumpulan

2. Pendahuluan

- a. Latar belakang pentingnya evaluasi SPBE.
- b. Tujuan kegiatan.
- c. Lokasi dan profil singkat instansi yang diteliti.

3. Metodologi

- a. Jelaskan keempat metode yang digunakan (Survei, Wawancara, Analisis Data, Benchmarking).
- b. Jelaskan langkah-langkah pelaksanaan di lapangan.

4. Hasil dan Analisis

- a. Hasil survei dan grafik kepuasan pengguna.
- b. Ringkasan hasil wawancara/FGD.
- c. Hasil analisis data sistem (trafik, waktu respon, dll).
- d. Hasil benchmarking antar instansi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Simpulkan efektivitas SPBE di instansi yang diteliti.
- b. Berikan saran perbaikan.

6. Lampiran

- a. Kuesioner dan hasil survei.
- b. Dokumentasi foto kegiatan.
- c. Transkrip atau catatan wawancara.

Rubrik Penilaian (100%)

Komponen Penilaian	Kriteria	Bobot
Pemilihan lokasi & relevansi instansi	Kesesuaian objek dengan tema SPBE	15%
Desain survei & pelaksanaan kuesioner	Jumlah responden, kualitas pertanyaan	20%
Hasil wawancara & kedalaman analisis stakeholder	Kejelasan temuan dan insight	20%
Analisis data sistem & benchmarking	Ketepatan analisis dan perbandingan	20%
Laporan akhir & penyajian hasil	Struktur, bahasa, dokumentasi, kesimpulan	25%